



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arungbinang, No. 16 Kebumen 54311 Telepon (0287) 381319, 381437 Fax. 381319
Email: Inspektoratkabkebumen@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Kebumen, 27 Maret 2022

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



AMIN RAHMANURRASJID, S.H, M.H

NIP.19720723 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan rasa syukur atas nikmat dan rahmat Tuhan Yang Maha ESA sehingga atas ijin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2022.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa *"Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota Kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun"*.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasama yang diberikan, semoga LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja yang baik serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, Maret 2023

BUPATI KEBUMEN


H. ARIF SUGIYANTO, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	1
c. Jumlah Penduduk	4
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	6
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah	7
f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	9
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	12
a. Isu Strategis Permasalahan Daerah.....	12
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	18
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	20
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.	29
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	73
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	79
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	79
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan.....	86
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	87
b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	140
c. Capaian IKK Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	156
B. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	159
a. Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja.....	161
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja 163	
c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya ..	165
d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	167
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai	169
f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja 196	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	215

A. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah	215
3.1.1. Target Kinerja	215
3.1.2. Realisasi	216
B. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah.....	218
i) Target Kinerja	218
ii) Realisasi	218
C. Permasalahan dan Kendala.....	218
D. Saran dan Tindaklanjut.....	218
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	219
A. Urusan Pendidikan.....	219
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	219
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	219
4.1.3. Realisasi	220
4.1.4. Alokasi anggaran	221
4.1.5. Dukungan Personil	221
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	221
B. Urusan Kesehatan.....	222
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	222
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	222
4.2.3. Realisasi	224
4.2.4. Alokasi Anggaran	227
4.2.5. Dukungan Personil	227
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	229
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	230
4.3.2. Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	230
4.3.3. Realisasi	231
4.3.4. Alokasi Anggaran	232
4.3.5. Dukungan Personil	233
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	233
D. Urusan Perumahan Rakyat.....	234
4.4.1. Jenis pelayanan Dasar	234
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	234
4.4.3. Realisasi	235
4.4.4. Alokasi Anggaran	236
4.4.5. Dukungan Personil	236
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	237
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	237
a. Jenis pelayanan Dasar	237
b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	237
c. Realisasi	238
d. Alokasi Anggaran	240
e. Dukungan Personil	240
f. Permasalahan dan Solusi	241
F. Urusan Sosial	241

4.6.1.	Jenis pelayanan Dasar	241
4.6.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	242
4.6.3.	Realisasi	243
4.6.4.	Alokasi Anggaran	244
4.6.5.	Dukungan Personil	244
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi	246
4.7.	Program dan Kegiatan	247
BAB V	PENUTUP	254
LAMPIRAN		255

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen.....	2
Tabel 1. 2 Persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen	4
Tabel 1. 3 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen	5
Tabel 1. 4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen.....	6
Tabel 1. 5 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2022...	8
Tabel 1. 6 Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (<i>unaudited</i>)	10
Tabel 1. 7 Progam dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022	30
Tabel 1. 8 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	70
Tabel 1. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	72
Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022	79
Tabel 2. 2 Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2018 – 2022	81
Tabel 2. 3 Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022	82
Tabel 2. 4 Angka Gini Ratio Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022	86
Tabel 2. 5 Capaian IKK Keluaran LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022	87
Tabel 2. 6 Capaian IKK Hasil LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022	140
Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Kabupaten Kebumen Tahun 2022.....	156
Tabel 2. 8 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2022..	160
Tabel 2. 9 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	161
Tabel 2. 10 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	163
Tabel 2. 11 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	165
Tabel 2. 12 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPJMD	167
Tabel 2. 13 Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022	169
Tabel 2. 14 Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja....	196

Tabel 3. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2022 .217

Tabel 4. 1 Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2022	219
Tabel 4. 2 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2022.....	220
Tabel 4. 3 Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022	222
Tabel 4. 4 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022	224
Tabel 4. 5 Dukungan Personel Pelaksanaan SPM Kesehatan Tahun 2022.....	227
Tabel 4. 6 Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022	231
Tabel 4. 7 Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	231
Tabel 4. 8 Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	233
Tabel 4. 9 Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022	234
Tabel 4. 10 Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022	235
Tabel 4. 11 Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Tahun 2022	236
Tabel 4. 12 Target Pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2022	237
Tabel 4. 13 Realisasi Pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2022	238
Tabel 4. 14 Dukungan Personil Penerapa SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022	240
Tabel 4. 15 Target Pencapaian SPM Sosial Tahun 2022.....	242
Tabel 4. 16 Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2022	243
Tabel 4. 17 Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen	2
Gambar 1. 2 Peta Topografi Kabupaten Kebumen.....	3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022	80
Grafik 2. 2 Angka Pengangguran Kabupaten Kebumen Tahun 2018 – 2022	83
Grafik 2. 3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022	84
Grafik 2. 4 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2018 – 2022	85

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen mendasari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Data Geografis Wilayah

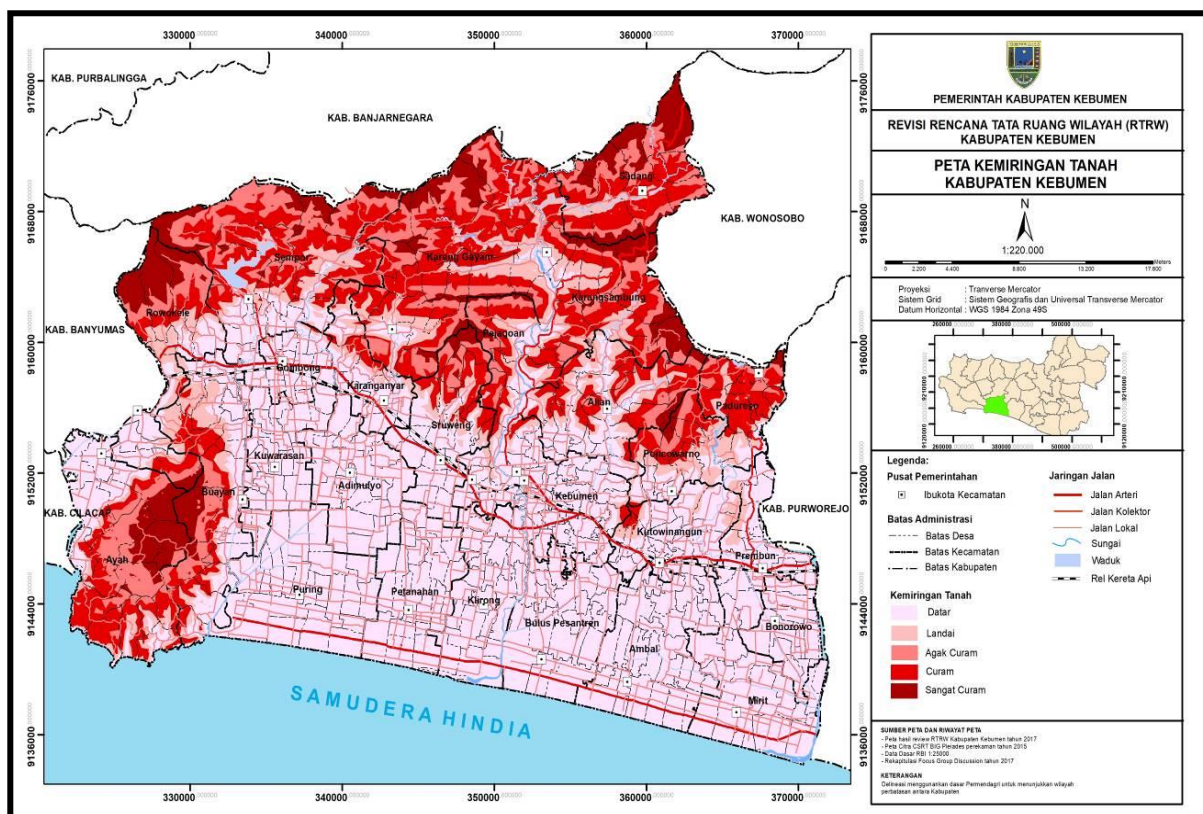
Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7°27'-7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1) :

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo
- Sebelah selatan Samudera Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut.

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, Peta Revisi RTRW, 2022

Gambar 1. 2 Peta Topografi Kabupaten Kebumen

Secara Hidrogeologis, Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sedangkan air tanah adalah semua air yang

terdapat pada lapisan pengandung air (*akuifer*) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 5,7 juta meter kubik per tahun. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Salah satu jenis air tanah dalam adalah cekungan air tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi cekungan air tanah Banyumudal, cekungan air tanah Kebumen Purworejo dan cekungan air tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumudal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombang, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2022

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.409.951 jiwa, tumbuh sebesar 0,003% dari tahun 2021. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 715.284 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 694.667 jiwa. Adapun data jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebagaimana data berikut ini :

Tabel 1. 3 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ayah	33.946	32.922	66.868
2	Buayan	34.788	33.401	68.189
3	Puring	33.076	32.415	65.491
4	Petanahan	31.360	30.725	62.085
5	Klirong	33.358	32.414	65.772
6	Buluspesantren	30.875	29.798	60.673
7	Ambal	33.277	31.840	65.117
8	Mirit	28.039	27.141	55.180
9	Prembun	14.839	14.720	29.559
10	Kutowinangun	25.159	24.333	49.492
11	Alian	35.464	34.022	69.486
12	Kebumen	68.046	66.351	134.397
13	Pejagoan	28.823	27.646	56.469
14	Sruweng	31.973	31.406	63.379
15	Adimulyo	19.181	19.294	38.475
16	Kuwarasan	26.669	25.667	52.336
17	Rowokele	26.876	26.281	53.157
18	Sempor	36.436	35.406	71.842
19	Gombong	25.064	25.182	50.246
20	Karanganyar	19.252	18.917	38.169
21	Karanggayam	31.503	30.221	61.724
22	Sadang	12.253	11.550	23.803
23	Bonorowo	11.358	10.909	22.267
24	Padureso	8.684	8.446	17.130
25	Poncowarno	9.800	9.454	19.254
26	Karangsambung	25.185	24.206	49.391
	Jumlah	715.284	694.667	1.409.951

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kebumen lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2022 berkisar antara 0,002%. Nilai ini diartikan setiap 100 penduduk

perempuan akan terdapat 102 penduduk laki-laki. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang di Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kebumen sebanyak 134.397 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Padureso sebanyak 17.130 jiwa.

d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui portal gis.dukcapil.kemendagri.go.id Tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen per 30 Juni 2022 adalah 1.409.951 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 743.323 jiwa dan perempuan sebanyak 694.667 jiwa Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km² atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombang, yaitu 19,48 km².

Tabel 1. 4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	81	396
2	Buayan	20	0	90	341
3	Puring	23	0	98	318
4	Petanahan	21	0	81	258
5	Klirong	24	0	107	318
6	Buluspesantren	21	0	82	386
7	Ambal	32	0	113	313
8	Mirit	22	0	70	265
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	130
11	Padureso	9	0	23	86
12	Kutowinangun	19	0	80	241
13	Alian	16	0	73	254

NO	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
14	Poncowarno	11	0	34	100
15	Kebumen	24	5	138	554
16	Pejagoan	13	0	64	257
17	Sruweng	21	0	97	332
18	Adimulyo	23	0	81	227
19	Kuwarasan	22	0	86	247
20	Rowokele	11	0	61	294
21	Sempor	16	0	74	368
22	Gombong	12	2	81	288
23	Karanganyar	7	4	61	242
24	Karanggayam	19	0	76	390
25	Sadang	7	0	35	131
26	Karangsambung	14	0	62	252
	Total	449	11	1.930	7.127

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2022

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 15 (lima belas) Dinas, 5 (lima) Badan, dan 26 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada perangkat daerah tersebut sampai dengan tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. 5 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen
Tahun 2022**

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1.	Sekretariat Daerah	87	72	159
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29	20	49
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	5	22
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	4	20
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	58	31	89
6.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20	11	31
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	13	20
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	15	35
9.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	484	1.435	1.919
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	20	9	29
11.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	95	30	125
12.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	39	13	52
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	169	31	200
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	15	30
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	16	23
16.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.217	4.808	8.025
17.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	80	20	100
18.	Dinas Pertanian dan Pangan	98	99	197
19.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	38	11	49
20.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	14	26
21.	Dinas Tenaga Kerja	24	15	39
22.	Inspektorat Daerah	28	23	51
23.	Kecamatan Adimulyo	14	6	20
24.	Kecamatan Alian	14	2	16
25.	Kecamatan Ambal	11	3	14
26.	Kecamatan Ayah	12	5	17
27.	Kecamatan Bonorowo	11	5	16
28.	Kecamatan Buayan	12	3	15
29.	Kecamatan Buluspesantren	9	8	17
30.	Kecamatan Gombong	18	8	26
31.	Kecamatan Karanganyar	30	12	42
32.	Kecamatan Karanggayam	12	2	14
33.	Kecamatan Karangsambung	11	6	17
34.	Kecamatan Kebumen	23	19	42

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
35.	Kecamatan Klirong	11	3	14
36.	Kecamatan Kutowinangun	9	7	16
37.	Kecamatan Kuwarasan	16	3	19
38.	Kecamatan Mirit	10	6	16
39.	Kecamatan Padureso	9	4	13
40.	Kecamatan Pejagoan	11	4	15
41.	Kecamatan Petanahan	10	6	16
42.	Kecamatan Poncowarno	8	5	13
43.	Kecamatan Prembun	11	7	18
44.	Kecamatan Puring	10	5	15
45.	Kecamatan Rowokele	13	4	17
46.	Kecamatan Sadang	12	3	15
47.	Kecamatan Sempor	12	6	18
48.	Kecamatan Sruweng	11	4	15
49.	Satuan Polisi Pamong Praja	43	4	47
50.	Sekretariat DPRD	24	6	30
	JUMLAH	4.977	6.866	11.843

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kebumen, 2022

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Penetapan kebijakan umum keuangan daerah meliputi penetapan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengacu pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang ingin dicapai dengan asumsi-asumsi perkembangan kondisi makro ekonomi daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan daerah ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Analisis berbagai objek penerimaan daerah dilakukan untuk memahami *trend* atau perilaku penerimaan selama kurun waktu tertentu.

Sementara analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berikut ini disajikan tabel data tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.

Tabel 1. 6 Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (unaudited)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN PENYERAPAN
	BELANJA DAERAH	3.011.233.908.000,00	2.824.202.755.673,00	93,79
I	BELANJA OPERASI	2.081.973.665.200,00	1.918.114.686.009,00	92,13
1	Belanja Pegawai	1.263.371.447.500,00	1.142.058.451.286,00	90,41
2	Belanja Barang dan Jasa	743.903.603.700,00	704.900.910.782,00	94,76
3	Belanja Subsidi	500.000.000,00	313.864.348,00	62,77
4	Belanja Hibah	61.060.802.000,00	59.752.651.931,00	97,86
5	Belanja Bantuan Sosial	13.316.312.000,00	11.088.807.122,00	83,27
II	BELANJA MODAL	293.658.929.800,00	272.301.599.864,00	97,63
1	Belanja Modal Tanah	2.823.562.000,00	1.387.839.580,00	49,15
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.595.993.800,00	102.152.506.285,00	94,94
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.830.252.000,00	34.758.067.305,00	83,09
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.634.445.000,00	126.620.498.535,00	94,75
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.774.677.000,00	7.382.688.159,00	94,96
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.800.000.000,00	1.295.204.500,00	46,26
1	Belanja Tidak Terduga	2.800.000.000,00	1.295.204.500,00	46,26
IV	BELANJA TRANSFER	632.801.313.000,00	632.491.265.300,00	99,95
1	Belanja Bagi Hasil	12.420.118.000,00	12.402.615.800,00	99,86
2	Belanja Bantuan Keuangan	620.381.195.000,00	620.088.649.500,00	99,95
	PENDAPATAN	2.760.699.783.000,00	2.847.821.402.683,00	102,61
V	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1	Pajak Daerah	121.170.200.000,00	129.845.616.038,00	107,16
2	Retribusi Daerah	32.501.085.000,00	28.374.432.9419,00	87,30
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.600.000.000,00	17.640.585.052,00	100,23

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN PENYERAPAN
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	269.161.766.000,00	337.014.024.645,00	125,21
	JUMLAH (V)	440.433.051.000,00	512.784.782.154,00	116,43
VI	PENDAPATAN TRANSFER			
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.138.030.271.000,00	2.123.296.694.941,00	99,31
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.664.423.000,00	206.406.947.000,00	109,40
3	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-
	JUMLAH (VI)	2.326.694.694.000,00	2.329.703.641.941,00	100,13
VII	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
1	Pendapatan Hibah	8.126.538.000,00	5.332.978.588,00	65,62
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH (VII)	8.126.538.000,00	5.332.978.588,00	65,62
VIII	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	271.279.625.000,00	271.279.627.198,98	100,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	269.179.625.000,00	219.983.034.565,98	100,00
2	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
IX	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.300.000.000,00	35.300.000.000,00	100,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
2	Penyertaan Modal Daerah	18.200.000.000,00	18.200.000.000,00	100,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00
X	PEMBIAYAAN NETTO	235.979.625.000,00	235.979.625.000,00	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Isu Strategis Permasalahan Daerah

Isu strategis permasalahan daerah merupakan permasalahan daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 serta prioritas kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori. Isu strategis permasalahan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022, antara lain:

1) Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas

Tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah guna mencetak sumberdaya manusia unggul yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas maka diperlukan peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan manusia antar gender di segala bidang. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat dan selaras dengan pencapaian sasaran tujuan pertama dalam sasaran SDGs/TPB mengurangi setidaknya setengah dari kemiskinan. Arah kebijakan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan dalam RPJPD 2020-2025 akan dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin, peningkatan tingkat pendapatan penduduk miskin, peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan harkat hidup dan martabat penduduk miskin.

Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak penting untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam setiap sektor pembangunan dan menciptakan generasi penerus yang dapat tumbuh dengan optimal. Capaian indikator keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan penting cukup rendah, derajat kesehatan perempuan tidak lebih baik jika dibandingkan dengan laki-laki. Tingkat partisipasi kerja perempuan rendah, walaupun bekerja kontribusi pendapatan perempuan juga tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, termasuk dalam kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang baik.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif belum dapat terpenuhi. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum dapat merespon kebutuhan pasar kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. Perlu upaya sistematis dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan peran dan kerja sama industri/swasta dalam penyelarasan program studi pada pendidikan tinggi maupun sekolah vokasi dengan kebutuhan pasar. Selain itu kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.

Selain dalam rangka membentuk SDM kompeten dan unggul, peningkatan derajat pendidikan dan ketrampilan dapat meningkatkan peluang keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja. Secara umum fasilitas pelayanan pendidikan yang dimiliki cukup memadai, ketersediaan tenaga pendidik maupun sarpras pendukung pembelajaran cukup memadai termasuk layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Tantangannya adalah menekan angka putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali belajar. Selain itu peningkatan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Kabupaten Kebumen mempunyai peluang emas dengan ditetapkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung dan Bregasmalang. Berdasarkan Perpres tersebut Kabupaten Kebumen berpeluang sebagai kawasan yang dapat meningkatkan nilai tambah pada Kawasan Bregasmalang yang diprioritaskan pada Kawasan Industri Brebes dalam bingkai Kawasan Barlingmascakeb. Kabupaten Kebumen dapat berperan sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang dalam aspek industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian dan tenaga kerja.

Dalam rangka optimalisasi peran Kabupaten Kebumen sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang, pemerintah pusat merencanakan program di Kabupaten Kebumen yaitu kawasan industri, industri gula semut, industri garam, industri perikanan dan ekonomi rakyat. Peluang tersebut harus diikuti dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil, kompeten, menguasai iptek dan *soft skill* yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan mencetak SDM unggul, produktif dan berdaya saing maka Kabupaten Kebumen dapat

menangkap peluang dari Perpres 79 tahun 2019 untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean dimana pasar tenaga kerja menjadi *borderless*. Tingkat persaingan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen tidak lagi pada lingkup regional maupun nasional namun global.

2) Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan

Manfaat pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan output/pendapatan suatu masyarakat atau perekonomian bertambah. Selain itu pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas, karena tersedia lebih banyak barang-barang maupun jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan atau kesenjangan ekonomi.

Pada analisis sebelumnya telah diketahui bahwa Kabupaten Kebumen setidaknya mempunyai 4 (empat) sektor unggulan yakni sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Sektor-sektor tersebut diharapkan akan lebih mampu berperan dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan daerah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu memperhatikan dengan serius keempat sektor unggulan tersebut dan dilaksanakan secara sinergis dengan sektor-sektor perekonomian yang lain.

Isu pembangunan daerah ke depan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonominya saja, tetapi juga dari sisi pemerataannya (*equity*). Kesejahteraan masyarakat secara luas tidak hanya akan terwujud dengan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi perlu redistribusi pendapatan secara merata ke setiap masyarakat, sehingga hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan ini juga muncul akibat dari keterbatasan kesempatan bagi

sebagian masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung di jantung aktivitas ekonomi. Masalah pendidikan dan kesehatan berkorelasi langsung dengan kurang baiknya tingkat adaptasi, respon, antisipasi, peran aktif masyarakat terhadap upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Selain itu, pemerintah harus berperan dalam pengendalian harga agar masyarakat dapat menjangkau harga kebutuhan pokok.

Selain terobosan melalui program-program penanggulangan kemiskinan, perlu upaya sistematis dalam pengendalian garis kemiskinan melalui pengendalian inflasi, serta pemantauan jalur-jalur distribusi dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu pentingnya membangun sinergitas dengan seluruh *stakeholder* baik pemerintah daerah, desa maupun non pemerintah dalam melakukan aksi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan.

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menanggulangi kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memfasilitasi BUMDesa dalam bentuk penyertaan modal, serta memastikan jenis usaha BUMDesa bisa menjadi penggerak kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat sesuai dengan potensi dan dituangkan dalam bentuk rencana bisnis. Kewenangan yang sudah diberikan kepada desa beserta alokasi anggaran harus bisa menjadikan desa sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Sehingga jumlah desa dengan kategori mandiri dan maju akan semakin meningkat lima tahun ke depan.

3) Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur memengaruhi *marginal productivity of private capital*. Sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Kwik Kian Gie, 2002). Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga

kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat (Aschauer, 1989; Munnell, 1990) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, adalah sebesar 60 persen (Suyono Dikun, 2003). Bahkan studi dari World Bank (1994) menyebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen sampai dengan 44 persen, variasi angka yang cukup signifikan. Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen saat ini menghadapi masalah yang sama dengan banyak daerah bahkan masalah nasional, yaitu “kesenjangan wilayah” (*regional imbalances*). Penyebab ketimpangan wilayah bersifat multi-faktor, dari hal yang bersifat alamiah seperti perbedaan kandungan sumberdaya alam, kualitas sumberdaya manusia, sampai kepada kurangnya infrastruktur wilayah yang menyebabkan rendahnya minat dan realisasi investasi. Infrastruktur jelas merupakan faktor utama yang signifikan untuk merapatkan atau merenggangkan ketimpangan wilayah tersebut. Pada umumnya, wilayah-wilayah miskin tidak memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, jauh kontras dibandingkan dengan wilayah yang tidak miskin. Hal ini mengisyaratkan bahwa infrastruktur menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin kompleks persoalan pembangunan tersebut mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan baru untuk mengatasi masalah ketimpangan. Diperlukan inovasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Kebumen ke depan agar isu ketimpangan yang selama ini belum mampu diatasi dapat teratasi dengan baik.

4) Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Optimal

Kabupaten Kebumen juga harus turut berperan dalam penyempurnaan kebijakan nasional di bidang aparatur sehingga mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda, manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda akan mendorong perubahan *mindset* dan *culture set* pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.

Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat.

Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pelayan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan sistem penataan peraturan perundang-undangan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sejahtera : Suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata;
2. Mandiri : Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi;
3. Berakhlak : Pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama;
4. Bersama Rakyat : Masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki. Maka ditetapkan Misi Kabupaten Kebumen terbagi dalam 5 (lima) sasaran yaitu:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi;
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan tahun 2022 difokuskan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD dan mencapai visi misi daerah serta pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Secara garis besar fokus dan prioritas masing-masing program adalah sebagai berikut:

I. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan; dan
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Kesehatan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- d. Program Penataan Bangunan Gedung;

- e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- f. Program Penyelenggaraan Jalan;
- g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan;
- b. Program Kawasan Permukiman;
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Sosial

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- d. Program Rehabilitasi Sosial;
- e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Program Penanganan Bencana; dan
- g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

II. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Program Hubungan Industrial; dan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Program Perlindungan Perempuan;
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- f. Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Pangan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pertanahan

Program yang dilaksanakan adalah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

5. Lingkungan Hidup

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
 - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - i. Program Pengelolaan Persampahan; dan
 - j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pendaftaran Penduduk;
 - b. Program Pencatatan Sipil;
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penataan Desa;
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pengendalian Penduduk;
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); dan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

9. Perhubungan

Program yang dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10. Komunikasi dan Informatika

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Aplikasi Informatika;
- b. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi; dan
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; dan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

12. Penanaman Modal

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Program Promosi Penanaman Modal;
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

14. Statistik

Program yang dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

15. Persandian

Program yang dilaksanakan adalah Program Informasi dan Komunikasi Publik.

16. Kebudayaan

Program yang dilaksanakan adalah

- a. Program Pengembangan Kebudayaan; dan
- b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

17. Perpustakaan

Program yang dilaksanakan adalah

- a. Program Pembinaan Perpustakaan; dan
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

18. Kearsipan

Program yang dilaksanakan adalah

- a. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno; dan
- b. Program Pengelolaan Arsip.

III. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Pariwisata

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- b. Program Pemasaran Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pertanian

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian; dan
- f. Program Penyuluhan Pertanian.

4. Kehutanan

Urusan Kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

6. Perdagangan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c. Program Pengembangan Ekspor;
- d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

7. Perindustrian

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; dan
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

8. Transmigrasi

Program yang dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Keuangan

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Kepegawaian Daerah; dan
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4. Penelitian dan Pengembangan

Program yang dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

5. Fungsi Lainnya

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan;
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

- f. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
- g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan Pemerintah Daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Program pembangunan daerah tahun 2021-2026 merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sesuai edaran Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa urusan dan kewenangan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai berlaku pada bulan Oktober 2016, maka program prioritas daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, telah dirumuskan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2022.

Hal ini untuk lebih menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara hasil Musrenbang dan RKPD Tahun 2022. Sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2022 dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel 1. 7 Progam dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			773.873.290.000
Pendidikan			211.046.235.000
	Program Pengelolaan Pendidikan		211.046.235.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	126.052.672.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.913.028.000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30.798.498.000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.282.037.000
Kesehatan			376.530.878.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		244.676.359.000
		Peningkatan Pelayanan BLUD	244.676.359.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		124.120.614.000
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	50.085.996.000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.009.618.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	25.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		117.500.000
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	45.000.000
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.500.000
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		553.882.000
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	92.000.000
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	461.882.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		7.062.523.000
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.693.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.632.372.000
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	255.458.000
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			151.072.401.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		24.842.323.000
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	925.000.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.917.323.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		9.239.754.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.239.754.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		7.038.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.038.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Penataan Bangunan Gedung		900.000.000
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	900.000.000
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		3.061.000.000
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.061.000.000
	Program Penyelenggaraan Jalan		104.063.300.000
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	104.063.300.000
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		387.224.000
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	192.724.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	147.250.000
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	47.250.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		1.540.800.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.145.480.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	145.400.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	195.400.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	54.520.000
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			14.674.044.000
	Program Pengembangan Perumahan		1.815.000.000
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	60.000.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.755.000.000
	Program Kawasan Permukiman		2.466.500.000
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.466.500.000
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		3.950.051.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	3.950.051.000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)		6.442.493.000
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.442.493.000
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			13.910.950.000
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		4.020.931.000
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.583.521.000
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	427.410.000
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	10.000.000
	Program Penanggulangan Bencana		8.038.600.000
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.558.600.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.905.000.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	175.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		1.851.419.000
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.756.649.000
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	39.520.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	55.250.000
Sosial			6.638.782.000
	Program Pemberdayaan Sosial		377.719.000
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	377.719.000
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		20.000.000
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Rehabilitasi Sosial		3.259.814.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.332.000.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	927.814.000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		1.105.970.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.105.970.000
	Program Penanganan Bencana		1.860.879.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.492.500.000
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	368.379.000
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		14.400.000
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.400.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			94.611.848.000
Tenaga Kerja			4.785.238.000
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		1.675.507.000
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.615.507.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	60.000.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja		2.970.000.000
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.585.000.000
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	385.000.000
	Program Hubungan Industrial		139.731.000
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	139.731.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1.085.737.000
	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		312.531.000
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	54.314.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	258.217.000
	Program Perlindungan Perempuan		263.935.000
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	42.190.000
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	221.745.000
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		12.919.000
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.919.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		30.134.000
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	30.134.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		198.739.000
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	102.607.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	96.132.000
	Program Perlindungan Khusus Anak		267.479.000
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	257.479.000
Pangan			4.219.000.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		1.335.000.000
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.335.000.000
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		1.839.000.000
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	394.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	500.000.000
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	945.000.000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan		875.000.000
		Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	20.000.000
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	855.000.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan		170.000.000
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000
Lingkungan Hidup			17.755.620.000
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		220.000.000
		Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	220.000.000
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		3.605.552.000
		Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	995.000.000
		Penanggulangan Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	919.152.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.691.400.000
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		3.244.490.000
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	3.244.490.000
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		110.000.000
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	110.000.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)		220.000.000
		Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	220.000.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		254.000.000
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	254.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		175.000.000
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		80.000.000
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	80.000.000
	Program Pengelolaan Persampahan		9.846.578.000
		Pengelolaan Sampah	9.846.578.000
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.385.795.000
	Program Pendaftaran Penduduk		3.419.323.000
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.707.644.000
		Penataan Pendaftaran Penduduk	1.661.679.000
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	50.000.000
	Program Pencatatan Sipil		310.815.000
		Pelayanan Pencatatan Sipil	293.375.000
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	17.440.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1.655.657.000
		Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	81.691.000
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.573.966.000
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			8.883.499.000
	Program Penataan Desa		80.000.000
		Penyelenggaraan Penataan Desa	80.000.000
	Program Peningkatan Kerjasama Desa		1.201.904.000
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	1.201.904.000
	Program Administrasi Pemerintahan Desa		7.097.417.000
		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	7.097.417.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat		504.178.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	504.178.000
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			13.394.115.000
	Program Pengendalian Penduduk		210.000.000
		Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	60.000.000
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	150.000.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		11.916.749.000
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.144.975.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	6.013.781.000
		Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	2.357.872.000
		Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.400.121.000
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		1.267.366.000
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	1.207.366.000
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	60.000.000
		Perhubungan	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		18.608.271.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota	12.884.260.000
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	648.500.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	137.500.000
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.500.740.000
		Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	950.000.000
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	38.071.000
		Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan	2.232.640.000
		Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.560.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
Komunikasi dan Informatika			5.283.283.000
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik		2.101.841.000
		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.101.841.000
	Program Aplikasi Informatika		3.181.442.000
		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.300.000.000
		Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	881.442.000
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			5.198.251.000
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		270.000.000
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		213.978.000
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	213.978.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		377.834.000
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	377.834.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		1.958.714.000
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.958.714.000
	Program Pengembangan UMKM		2.377.725.000
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.377.725.000
Penanaman Modal			1.220.792.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		145.000.000
		Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	85.000.000
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	60.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Promosi Penanaman Modal		240.000.000
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	240.000.000
	Program Pelayanan Penanaman Modal		373.330.000
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	373.330.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		422.462.000
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	422.462.000
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		40.000.000
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
Kepemudaan dan Olah Raga			4.477.713.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		770.124.000
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	770.124.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		3.313.161.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.435.594.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	327.567.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.150.000.000
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		394.428.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	394.428.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
Statistik			141.929.000
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		141.929.000
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	141.929.000
Persandian			337.210.000
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		337.210.000
		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	337.210.000
Kebudayaan			2.377.350.000
	Program Pengembangan Kebudayaan		2.041.000.000
		Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.000.000
		Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.846.000.000
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		336.350.000
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	336.350.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
Perpustakaan			938.696.000
	Program Pembinaan Perpustakaan		921.072.000
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	421.574.000
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	499.498.000
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		17.624.000
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	17.624.000
Kearsipan			519.349.000
	Program Pengelolaan Arsip		519.349.000
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	299.252.000
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	51.430.000
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	168.667.000
Urusan Pemerintahan Pilihan			74.045.265.000
Kelautan dan Perikanan			15.791.686.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		6.182.990.000
		Pengelolaan Penangkapan Ikan Di	4.395.490.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	554.500.000
		Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.173.000.000
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	60.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		7.758.696.000
		Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	7.708.696.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan		280.000.000
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	280.000.000
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		1.570.000.000
		Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	220.000.000
		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.350.000.000
Pariwisata			9.809.225.000
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		8.214.904.000
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	675.000.000
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.409.904.000
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	130.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Pemasaran Pariwisata		1.494.321.000
		Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1.494.321.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		100.000.000
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100.000.000
Pertanian			39.131.357.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		14.768.800.000
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.398.220.000
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	10.679.138.000
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	399.204.000
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	30.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	262.238.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		17.452.217.000
		Pengembangan Prasarana Pertanian	1.144.217.000
		Pembangunan Prasarana Pertanian	12.366.000.000
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.942.000.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1.305.788.000
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	663.290.000
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	265.498.000
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	177.000.000
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	150.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	50.000.000
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		565.000.000
		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	565.000.000
	Program Perizinan Usaha Pertanian		100.000.000
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	50.000.000
	Program Penyuluhan Pertanian		4.939.552.000
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4.939.552.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
Energi dan Sumber Daya Mineral			30.000.000
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		30.000.000
		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
Perdagangan			5.470.000.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		4.100.000.000
		Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.900.000.000
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	1.200.000.000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		370.000.000
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	250.000.000
		Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	120.000.000
	Program Pengembangan Ekspor		250.000.000
		Penyelenggaraan Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		350.000.000
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	350.000.000
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		400.000.000
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	400.000.000
Perindustrian			3.562.997.000
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		3.212.997.000
		Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.212.997.000
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota		250.000.000
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		100.000.000
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
Transmigrasi			250.000.000
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		250.000.000
		Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	250.000.000
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			52.575.939.000
Sekretariat Daerah			37.651.439.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		23.889.294.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.975.715.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.243.807.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.795.000.000
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	939.847.000
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	580.000.000
		Penataan Organisasi	795.000.000
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	564.925.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		10.795.591.000
		Administrasi Tata Pemerintahan	522.400.000
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.523.000.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	695.191.000
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	55.000.000
	Program Perekonomian dan Pembangunan		2.966.554.000
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	522.406.000
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	400.000.000
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000.000
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	444.148.000
Sekretariat DPRD		14.924.500.000	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		14.924.500.000
		Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD	2.340.000.000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	660.000.000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	210.000.000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.869.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	980.000.000
		Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	50.000.000
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	25.000.000
		Fasilitasi Tugas DPRD	5.790.500.000
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			636.831.376.000
Perencanaan			2.237.991.000
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1.120.991.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	970.991.000
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70.000.000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	80.000.000
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1.117.000.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	295.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	222.000.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	600.000.000
Keuangan			628.507.028.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		621.538.019.000
		Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.348.007.000
		Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	836.569.000
		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	701.050.000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	618.652.393.000
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.727.363.000
		Pengelolaan Barang Miik Daerah	1.727.363.000
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.241.646.000
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.241.646.000
Kepegawaian			1.859.750.000
	Program Kepegawaian Daerah		1.859.750.000
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.108.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Mutasi dan Promosi ASN	466.750.000
		Pengembangan Kompetensi ASN	65.000.000
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	220.000.000
Pendidikan dan Pelatihan			3.499.000.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		3.499.000.000
		Pengembangan Kompetensi Teknis	450.000.000
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	3.049.000.000
Penelitian dan Pengembangan			727.607.000
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		727.607.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	594.985.000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	132.622.000
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			1.099.309.000
Inspektorat Daerah			1.099.309.000
	Program Penyelenggaraan Pengawasan		805.558.000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	555.558.000
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	250.000.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		293.751.000
		Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	29.751.000
		Pendampingan dan Asistensi	264.000.000
Unsur Kewilayahan			19.135.133.000
Kecamatan			19.135.133.000
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		1.642.660.000
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1.642.660.000
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		14.083.656.000
		Kegiatan pemberdayaan kelurahan	14.083.656.000
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		480.910.000
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	480.910.000
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		2.927.907.000
		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.927.907.000
Unsur Pemerintahan Umum			5.672.740.000
Kesatuan Bangsa dan Politik			5.672.740.000
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		483.247.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	483.247.000
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		3.420.289.000
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan	3.420.289.000
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		76.764.000
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	76.764.000
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		1.513.341.000
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1.513.341.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatf 2022
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		179.099.000
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	179.099.000

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 8 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi					
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik
		1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	2	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik
		1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	3	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan penertiban administrasi aset daerah
Misi 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya					
1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	1	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik
		1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	2	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
		1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	3	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak
Misi 3: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan					
1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi	1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	1	Meningkatkan hasil produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan perkebunan
		1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	2	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
		1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	3	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
	unggulan daerah	1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan	2.1	Berkurangnya penduduk miskin	1	Penurunan kemiskinan
		2.2	Berkurangnya pengangguran	2	Penurunan pengangguran
Misi 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
1.	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	2	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat					
1.	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	1.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	1	Penjagaan kesatuan bangsa
		1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	2	Pelestarian cagar budaya
2.	Mewujudkan kondusitivitas wilayah	2.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	1	Penurunan tindakan kriminal masyarakat
		2.2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	2	Peningkatan desa tangguh bencana

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 7 (tujuh) Tujuan, 18 (delapan belas) Sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yaitu :

- a. Misi I terdapat 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran;
- b. Misi II terdapat 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) Sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran;
- c. Misi III terdapat 2 (dua) Tujuan, 6 (enam) Sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran;
- d. Misi IV terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran; dan
- e. Misi V terdapat 2 (dua) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran.

Tabel 1. 9 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83,00
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	67,00
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,43
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,60
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,74
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,54
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,25
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.362,9
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.674,7
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.184,6

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	16,00-17,00
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,51-5,58
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	53,81
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,10
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	60,71
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	25,05
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100

Sumber : Bagian Organisasi Seda Kabupaten Kebumen Tahun 2022

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan aturan

tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah juga menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Dasar Hukum Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dasar hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

c. Kebijakan Umum Daerah

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan memberikan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan pembangunan merupakan keputusan dari semua pemangku kepentingan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran beserta kebijakan umum dan program pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan :

1. Integrasi SPM dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD, yaitu :
 - 1) Perumusan permasalahan pembangunan ;
 - 2) Penentuan pagu indikatif program/kegiatan.

- b. Dijadikan sebagai salah Satu Kriteria Penentuan Urutan Prioritas Program/Kegiatan dari Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan, dengan kriteria sebagai berikut :
- 1) Kesesuaian dengan Rancangan awal RKPD;
 - 2) Dukungan pemenuhan hak dasar rakyat dengan SPM;
 - 3) Kontribusi pada pencapaian target prioritas Pembangunan Kabupaten;
 - 4) Dukungan nilai tambah.
-
2. Integrasi SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 3. Integrasi SPM dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah;
 4. Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 5. Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****2.1. Capaian Kinerja Makro**

Para pakar ekonomi menggunakan banyak jenis data untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah atau wilayah. Beberapa indikator yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah tersebut diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan. Capaian kinerja makro tersebut dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Untuk menghitung perubahan capaian indikator makro dilakukan dengan cara menghitung capaian kinerja makro tahun pelaporan dikurangi capaian kinerja makro tahun sebelumnya dibagi dengan capaian kinerja makro tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Berikut ini capaian indikator kinerja makro Kabupaten Kebumen tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Laju Kinerja 2022
		Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,05	70,79	1,056
2	Angka Kemiskinan	17,83	16,41	-7,964
3	Angka Pengangguran	6,03	5,92	-1,824
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,71	5,79	56,065
5	Pendapatan Per-Kapita	21,71	23,68	9,074
6	Ketimpangan Pendapatan	0,350	0,354	1,143

Sumber Data : BPS Kabupaten Kebumen 2022

a. Indeks Pembangunan Manusia

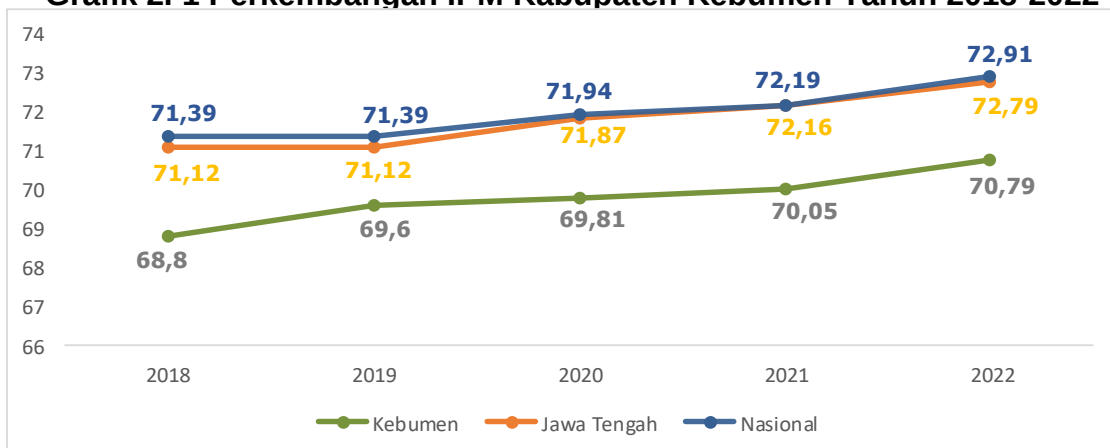
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

IPM Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan sebesar 1,99 yaitu dari tahun 2018 sebesar 68,8 dan pada tahun 2022 sebesar 70,79 atau peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,49. Hal ini menunjukkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen selama 5 tahun terakhir semakin membaik.

Berdasarkan skala internasional UNDP (*United Nations Development Programme*), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Sejak tahun 2010 hingga 2020 IPM Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang, dan mulai tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen termasuk kategori tinggi.

Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat 5 tahun terakhir, namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2022 berturut-turut sebesar 72,79 dan 72,91. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 secara lengkap tersaji dalam gambar berikut:

Grafik 2. 1 Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (data diolah)

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), Aspek pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Aspek standar hidup layak diukur melalui indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2018-2022 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen mengalami tren kenaikan. Kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin jauh dari garis kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kenaikan Garis Kemiskinan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin secara linier yang menyebabkan jarak antara pengeluaran masyarakat miskin semakin jauh dengan Garis Kemiskinan. Kenaikan Garis Kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan Garis Kemiskinan.

Selain itu, kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan mencerminkan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2. 2 Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2018 – 2022

Profil Kemiskinan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	208.700	201.340	211.090	212.900	196.160
Persentase Penduduk Miskin	17,47%	16,82%	17,59%	17,83%	16,41%

Garis Kemiskinan	342,437	362,847	380.557	390.599	416.004
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,48	2,58	2,62	3,24	3,41
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,55	0,65	0,55	0,88	1,02

Sumber : Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2022

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0,65%. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 sedikit banyak berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada kurun waktu tersebut meningkat sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan 0,24% pada tahun 2021. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian pasca turunnya kasus Covid-19 pada tahun 2022, tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang tergambar dari penurunan angka kemiskinan sebesar 1,42%. Capaian ini sudah sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 16,00%-17,00%.

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan. Kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Uraian	% Penduduk Miskin					% Penurunan 2021-2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kebumen	17,47	16,82	17,59	17,83	16,41	1,42
Jawa Tengah	11,32	10,80	11,41	11,79	10,93	0,86
Nasional	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	0,6

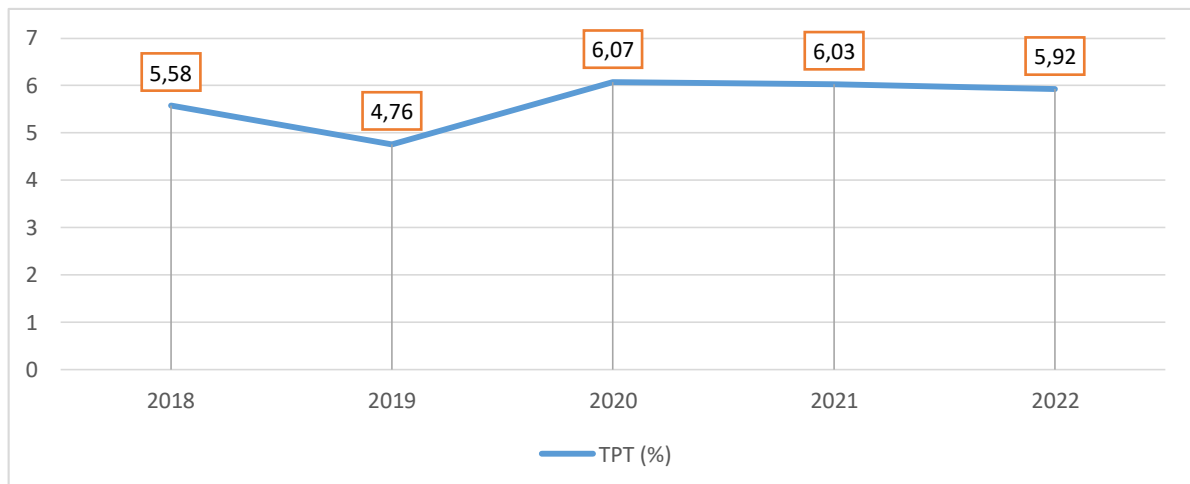
Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2022

c. Angka Pengangguran

Dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk Angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Adapun perkembangan TPT di Kabupaten Kebumen Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2. 2 Angka Pengangguran Kabupaten Kebumen Tahun 2018 – 2022



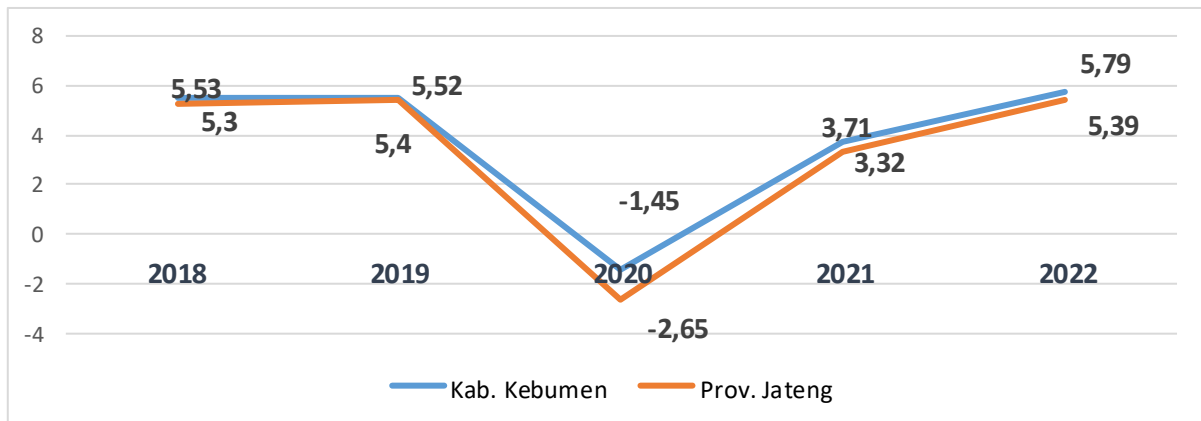
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Perkembangan TPT di Kabupaten Kebumen selama 2018 – 2022 menunjukkan fluktuatif dan terjadi tren penurunan dari 6,07 persen pada tahun 2020 menjadi 5,92 persen pada tahun 2022. Hal ini berarti dari 100 angkatan kerja terdapat 6 orang yang menganggur.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi riil keberhasilan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Secara umum selama periode Tahun 2018-2022 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 sebesar 3,71 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,45 persen. Kemudian pada tahun 2022 ekonomi Kabupaten Kebumen tumbuh sebesar 5,79 persen, berada di atas capaian Jawa Tengah sebesar 5,39 persen.

Grafik 2. 3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022



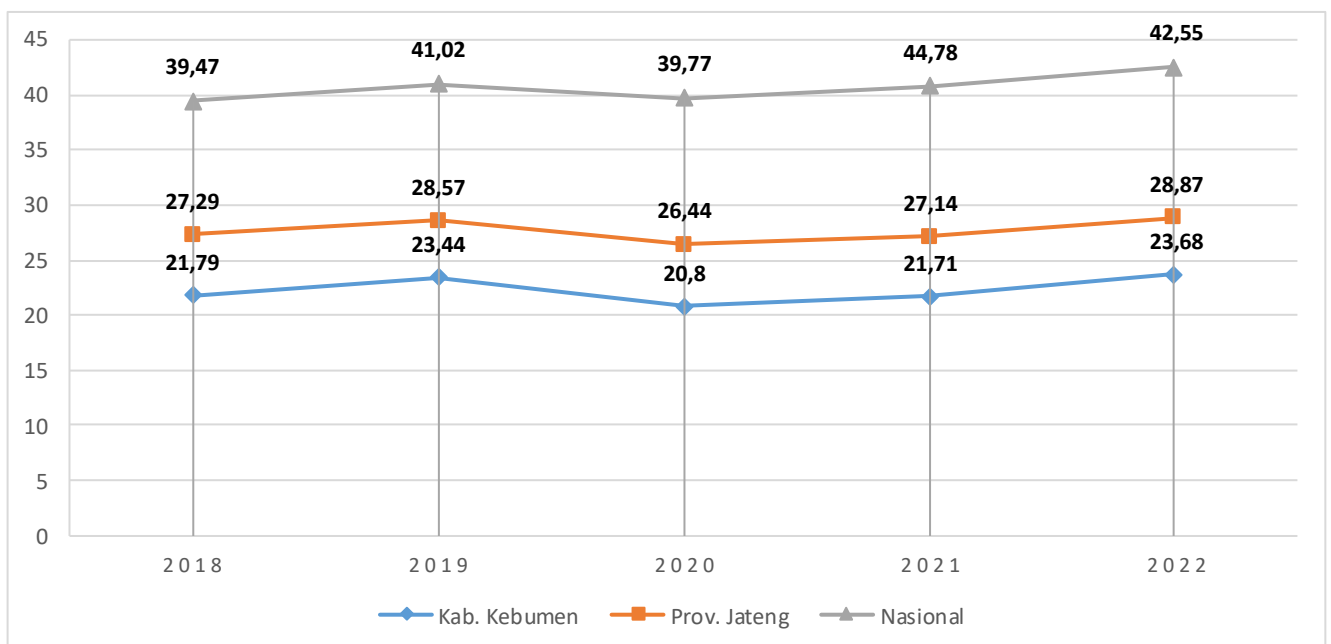
Sumber : BPS Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Tahun 2022, berdasarkan angka realisasi, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu 58,46 persen, disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 28,31 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 17,73 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -1,18 persen. Lapangan usaha transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum dapat tumbuh sejalan dengan tertanganinya kasus Covid-19 melalui program vaksinasi yang masif. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas secara luring dan melakukan perjalanan antar daerah.

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah yang menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Dalam 5 tahun terakhir, pendapatan perkapita di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi walau tidak dalam jarak yang terlalu besar. Penurunan terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 sebesar - 23,44 (juta) menjadi 20,8 (juta). Namun pada tahun 2021 pendapatan perkapita kembali naik dengan peningkatan 0,91 (juta) dan kembali terjadi peningkatan sebesar 1,97 (juta) pada tahun 2022, sebagaimana grafik 2.4 dibawah ini.

Grafik 2. 4 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kebumen Tahun 2018 – 2022 (juta)



Sumber : BPS Kabupaten Kebumen Tahun 2022

f. Ketimpangan Pendapatan

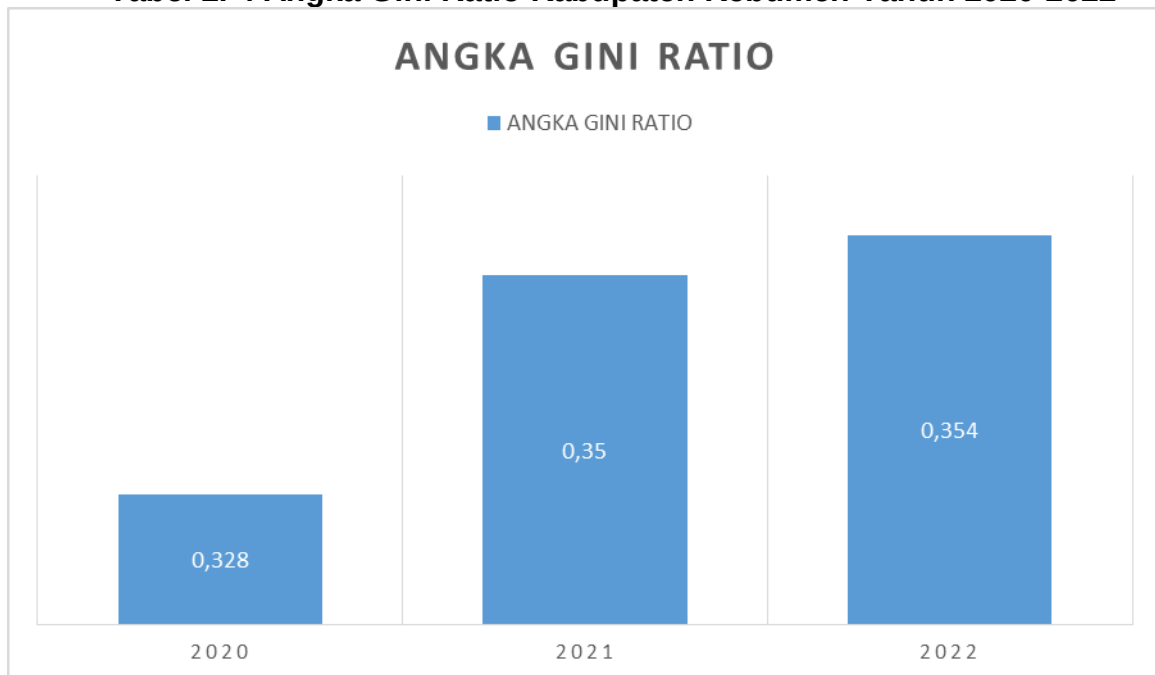
Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan

pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah.

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 capaian kinerja 0,350 persen sedangkan ditahun 2022 0,354 persen sehingga disimpulkan laju kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu 1,143 persen.

Ketimpangan pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4 Angka Gini Ratio Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2022



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen Tahun 2022

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Tabel 2. 5 Capaian IKK Keluaran LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Pendidikan					
		1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	556	DISDIKPORA	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	32.507	DISDIKPORA	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	32.507	DISDIKPORA	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.144	DISDIKPORA	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	3.167	DISDIKPORA	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	773	DISDIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	773	DISDIKPORA	
	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	783	DISDIKPORA	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	102.599	DISDIKPORA	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	43.394	DISDIKPORA	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	43.394	DISDIKPORA	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	43.394	DISDIKPORA	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6.008	DISDIKPORA	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah	2.275	DISDIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		menengah pertama (Negeri dan Swasta)			
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6.065	DISDIKPORA	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.275	DISDIKPORA	
		10.jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6.008	DISDIKPORA	
		11.jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.275	DISDIKPORA	
		12.jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	994	DISDIKPORA	
		13.jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	620	DISDIKPORA	
		14.Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.834	DISDIKPORA	
		15.Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.032	DISDIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	751	DISDIKPORA	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	122	DISDIKPORA	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	497	DISDIKPORA	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	428	DISDIKPORA	
	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	14	DISDIKPORA	
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.332	DISDIKPORA	
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan	2.332	DISDIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	50	DISDIKPORA	
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	50	DISDIKPORA	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	48	DISDIKPORA	
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	751	DISDIKPORA	
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	24	DISDIKPORA	
	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	11 Unit	DINKES PPKB	
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	11 Unit	DINKES PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (co :obat-obat)	17.549 Paket	DINKES PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	826 Orang	DINKES PPKB	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17.549 Paket	DINKES PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	434 Orang	DINKES PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17.412 Paket	DINKES PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	600 Orang	DINKES PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	93.463 Paket	DINKES PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	635 Orang	DINKES PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	186.457 Paket	DINKES PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	635 Orang	DINKES PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	586.118 Paket	DINKES PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	175 Orang	DINKES PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	163.371 Paket	DINKES PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	635 Orang	DINKES PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	87.026 Paket	DINKES PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	140 Orang	DINKES PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11.858 Paket	DINKES PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	175 Orang	DINKES PPKB	
	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4033 Paket	DINKES PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	76 Orang	DINKES PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13.624 Paket	DINKES PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	235 Orang	DINKES PPKB	
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22.318 Paket	DINKES PPKB	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	235 Orang	DINKES PPKB	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPU PR	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	DPU PR	
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	DPU PR	
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DPU PR	
		6. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	DPU PR	
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0	DPU PR	
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	76.31	DPU PR	
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0%	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	DPU PR	
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Penataan Ruang	(Ada/Tidak)			
		3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada	DPU PR	
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	185	DPU PR	
		5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	4.365	DPU PR	
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	732	DPU PR	
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	5.097	DPU PR	
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	295	DPU PR	
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan	295	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		jasa pengolahan lumpur tinja			
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	295	DPU PR	
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	0	DPU PR	
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	DPU PR	
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	22,34	DPU PR	
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	5,77	DPU PR	
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50	DPU PR	
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	10	DPU PR	
		13. Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	77,27	DPU PR	
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,39	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	1.722	DPUPR	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalatahun eksisting	146	DPU PR	
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada (Perda 26 2012 tentang	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			Bangunan Gedung)		
		4. Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Tidak	DPU PR	
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	DPU PR	
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	0	DPU PR	
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	DPU PR	
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	0	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	960.358	DPU PR	
		2. Panjang jalan yang dibangun	2.885	DPU PR	
		3. Panjang jembatan yang dibangun	0	DPU PR	
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	13.933	DPU PR	
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	124,83	DPU PR	
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	15.513	DPU PR	
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	67,5	DPU PR	
		8. Panjang jalan yang dipelihara	18,64	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	0	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	4	DPU PR	
		2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	DPU PR	
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	103	DPU PR	
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	2	DPU PR	
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	2	DPU PR	
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	0	DPU PR	
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	2	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	DPU PR	
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	DPU PR	
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	4	DPU PR	
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	4	DPU PR	
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	100	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	273	DPU PR	
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPU PR	
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPU PR	
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPU PR	
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPU PR	
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	DPU PR	
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	DPU PR	
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	273	DPU PR	
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPU PR	
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPU PR	
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPU PR	
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	21	DISPERKIMHUB	
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	21	DISPERKIMHUB	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	75	DISPERKIMHUB	
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	6	DISPERKIMHUB	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DISPERKIMHUB	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	15	DISPERKIMHUB	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DISPERKIMHUB	
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	75	DISPERKIMHUB	
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	16,757	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIMHUB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIMHUB	
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DISPERKIMHUB	
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	23	DISPERKIMHUB	
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	112	DISPERKIMHUB	
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	151.26	DISPERKIMHUB	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	24.895	DISPERKIMHUB	
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	38.664	DISPERKIMHUB	
	Perumahan	1. Jumlah rumah di kab/kota	354.807	DISPERKIMHUB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Rakyat	2. Jumlah unit PK RTLH	1.447	DISPERKIMHUB	
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	24.895	DISPERKIMHUB	
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DISPERKIMHUB	
		5. Rasio rumah dan KK	0,847	DISPERKIMHUB	
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	27	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	41	DISPERKIMHUB	
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	3.773	DISPERKIMHUB	
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	3.773	DISPERKIMHUB	
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	3.773	DISPERKIMHUB	
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	DISPERKIMHUB	
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	DISPERKIMHUB	
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	DISPERKIMHUB	
		8. Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	DISPERKIMHUB	
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	DISPERKIMHUB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	5.525	Satpol PP	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2.649	Satpol PP	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	22	Satpol PP	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4	Satpol PP	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	7	Satpol PP	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	963	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBP	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	BPBP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBP	
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara ikut pelatihan	100	BPBP	
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBP	
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	22,6	BPBP	
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	BPBP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	BPBD	
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	BPBD	
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	BPBD	
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	653	Satpol PP	
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4	Satpol PP	
		3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	66	Satpol PP	
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	4	Satpol PP	
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	103	Satpol PP	
		6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	77	Satpol PP	

No	Ururan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	133	Satpol PP	
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	72	Satpol PP	
.	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	10	DINSOS P3A	
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1	DINSOS P3A	
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	DINSOS P3A	
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	700	DINSOS P3A	
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4	DINSOS P3A	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	660	DINSOS P3A	
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DINSOS P3A	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	190	DINSOS P3A	
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	157	DINSOS P3A	
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	3	DINSOS P3A	
		11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1	DINSOS P3A	
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	100	DINSOS P3A	
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2	DINSOS P3A	
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	290	DINSOS P3A	
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	100	DINSOS P3A	

No	Ururan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	48	DINSOS P3A	
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	10	DINSOS P3A	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	133	DINSOS P3A	
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	20	DINSOS P3A	
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	95	DINSOS P3A	
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	60	DINSOS P3A	
	Sosial	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	1.500	DINSOS P3A	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	350	DINSOS P3A	
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2	DINSOS P3A	
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	2	DINSOS P3A	
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan	250	DINSOS P3A	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dukungan psikososial			
		6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	290	DINSOS P3A	
	Tenaga Kerja	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	1,56	Dinas Tenaga Kerja	
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	13,43	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	13,43	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	448	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	96,42	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Persentase penyerapan lulusan	26,11	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	96,42	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	1,4	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	1	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Data tingkat produktivitas total	0	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	25,11	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0,5	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1.47	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah perselisihan PHK	9	Dinas Tenaga Kerja	
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	9	Dinas Tenaga Kerja	
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	9	Dinas Tenaga Kerja	
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Tenaga Kerja	
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	Dinas Tenaga Kerja	
	Tenaga Kerja	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	11.945	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	15.105	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	64	Dinas Tenaga Kerja	
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu	16	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kabupaten/kota			
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	257	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Dinas Tenaga Kerja	
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	5,7	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	2.105	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0,5	Dinas Tenaga Kerja	
		12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	1,24	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	18,79	Dinas Tenaga Kerja	
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1	Dinas Tenaga Kerja	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	52	PMD	
		2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	33	PMD	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	13	PMD	
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	PMD	
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	PMD	
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	422	PMD	
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	PMD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	30	PMD	
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	40	PMD	
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	422	PMD	
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	PMD	
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2	PMD	
		6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	PMD	
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	PMD	
	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	93	DISTAPANG	
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	2	DISTAPANG	

No	Ururan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	1	DISTAPANG	
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	24	DISTAPANG	
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	DISTAPANG	
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	3	DISTAPANG	
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	23	DISTAPANG	
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	256	DISTAPANG	
	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	6	DPMPTSP	
		2. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	6	Bag. Pemerintahan	
		3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	Bag. Pemerintahan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pertanahan	4. Dokumen Izin membuka tanah	0	DPMPTSP	
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	1	DPMPTSP	
	Lingkungan Hidup	1. Hasil perhitungan kabupaten terhadap:		DISPERKIMHUB	
		a. Indeks kualitas air (IKA)	54,49		
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,94		
		c. Indeks tutupan hutan (ITH)	49,53		
	Lingkungan Hidup	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	100	DISPERKIMHUB	
	Lingkungan Hidup	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	115	DISPERKIMHUB	
		2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	1,74	DISPERKIMHUB	
		3. Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0	DISPERKIMHUB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DISPERKIMHUB	
		5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	12		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan	100	DISDUKCAPIL	
		2. Penerbitan akta perceraian	100	DISDUKCAPIL	
		3. Penerbitan akta kematian	100	DISDUKCAPIL	
		4. Penyajian data kependudukan (berapa jumlah buku yang dicetak profil kependudukan)	100	DISDUKCAPIL	
	Pemberdayaa n Masyarakat	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	229	PMD	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	217	PMD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	252	PMD	
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	82	PMD	
	Pengendalian Penduduk dan KB	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	0	DINSOS P3A	
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21,5	DINSOS P3A	
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9,35	DINSOS P3A	
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	78,17	DINSOS P3A	
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	20	DINSOS P3A	
	Pengendalian Penduduk dan	1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	DINSOS P3A	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	KB	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	68,84	DINSOS P3A	
		3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	20	DINSOS P3A	
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	29,23	DINSOS P3A	
	Pengendalian Penduduk dan KB	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	230	DINSOS P3A	
		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	98,78	DINSOS P3A	
	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	66.66	DISPERKIMHUB	
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	145,95	DISPERKIMHUB	
		3. Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0,82	DISPERKIMHUB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	41,6	DISPERKIMHUB	
	Kominfo	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi diJaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh DinasKominfo	100	DINAS KOMINFO	
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	DINAS KOMINFO	
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1	DINAS KOMINFO	
	Kominfo	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daringdengan memanfaatkandomain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuaidengan PM Kominfo No.5/2015	100	DINAS KOMINFO	
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	DINAS KOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	DINAS KOMINFO	
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	DINAS KOMINFO	
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100	DINAS KOMINFO	
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	DINAS KOMINFO	
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	54,08	DINAS KOMINFO	
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	DINAS KOMINFO	
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100	DINAS KOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	DINAS KOMINFO	
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	DINAS KOMINFO	
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	38	DINAS KOMINFO	
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	DINAS KOMINFO	
		14. Tersedianya peraturandaerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1	DINAS KOMINFO	
	Kominfo	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi	100	DINAS KOMINFO	
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	DINAS KOMINFO	
		3. Persentase diseminasi dan layananinformasi publik yang	100	DINAS KOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan			
	KUKM	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	85	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	92	Dinas Tenaga Kerja	
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	91,89	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	42,53	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti	0,5	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota			
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11,39	Dinas Tenaga Kerja	
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	12	Dinas Tenaga Kerja	
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	91,89	Dinas Tenaga Kerja	
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,03	Dinas Tenaga Kerja	
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	43,29	Dinas Tenaga Kerja	
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	47,84	Dinas Tenaga Kerja	
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	2,53	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
	KUKM	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,62	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	2,44	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,2	Dinas Tenaga Kerja	
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,16	Dinas Tenaga Kerja	
		5. Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.01	Dinas Tenaga Kerja	
		6. Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan pemasaran	0,21	Dinas Tenaga Kerja	
		7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0.23	Dinas Tenaga Kerja	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	DPMPTSP	
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	DPMPTSP	
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP	
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	DPMPTSP	
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	3	DPMPTSP	
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	DPMPTSP	
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	5.256	DPMPTSP	
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	12.024	DPMPTSP	
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 564.646.202. 367,-	DPMPTSP	
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	23	DPMPTSP	
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	307	DPMPTSP	
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	4	DPMPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	5	DISDIKPORA	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	0	DISDIKPORA	
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	688	DISDIKPORA	
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	60	DISDIKPORA	
	Pemuda dan Olahraga	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	40	DISDIKPORA	
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	DISDIKPORA	
	Statistik	1. Tersedianya buku profil daerah	1	DINAS KOMINFO	
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	DINAS KOMINFO	
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2	DINAS KOMINFO	
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	DINAS KOMINFO	
		5. Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	DINAS KOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	DINAS KOMINFO	
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistic	100	DINAS KOMINFO	
	Persandian	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	DINAS KOMINFO	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	DINAS KOMINFO	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	DINAS KOMINFO	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0	DINAS KOMINFO	
	Kebudayaan	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	524	DISDIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	524	DISDIKPORA	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	524	DISDIKPORA	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	75	DISDIKPORA	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	130	DISDIKPORA	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	3	DISDIKPORA	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DISDIKPORA	
		8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1	DISDIKPORA	
		9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	3	DISDIKPORA	
	Kebudayaan	1. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan	0	DISDIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		koleksi museum			
		2. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	DISDIKPORA	
		3. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	DISDIKPORA	
		4. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	DISDIKPORA	
		5. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	DISDIKPORA	
		6. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	DISDIKPORA	
		7. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	50	DISDIKPORA	
		8. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	50	DISDIKPORA	
		9. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1	DISDIKPORA	
		10. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	DISDIKPORA	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2,62	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	29,42	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	19,42	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6,44	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	5.230	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Perpustakaan	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Kearsipan dan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
				Perpustakaan	
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kelautan	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	4.439	DLHKP	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100	DLHKP	
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	100	DLHKP	
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	202	DLHKP	
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	35.472.907	DLHKP	
	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	129	DISPARBUD	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan	1895	DISPARBUD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		fasilitas pariwisata			
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	702	DISPARBUD	
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	9	DISPARBUD	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	17	DISPARBUD	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	DISPARBUD	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	81	DISPARBUD	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	DISPARBUD	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	DISPARBUD	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	19	DISPARBUD	
	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan	677	DISTAPANG	
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	465	DISTAPANG	
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	243	DISTAPANG	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4. Persentase prasarana yang digunakan	100	DISTAPANG	
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	100	DISTAPANG	
	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular)	23,98	DISTAPANG	
	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah	0	PROVINSI	
	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	99,78	DISPERINDAG KUKM	
		2. Persentase penerbitan TDG	99,78	DISPERINDAG KUKM	
		3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100	DISPERINDAG KUKM	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	DISPERINDAG KUKM	
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0	DISPERINDAG KUKM	
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0	DISPERINDAG KUKM	
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	DISPERINDAG KUKM	
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan	0	DISPERINDAG KUKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota			
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	DISPERINDAG KUKM	
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	DISPERINDAG KUKM	
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5,9	DISPERINDAG KUKM	
	Perdagangan	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	98,09	DISPERINDAG KUKM	
	Perdagangan	1. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	68,32	DISPERINDAG KUKM	
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	100	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	1. Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	DISPERINDAG KUKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
	Perindustrian	2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	0	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	0,01	DISPERINDAG KUKM	
	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	4	Dinas Tenaga Kerja	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	4	Dinas Tenaga Kerja	
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	4	Dinas Tenaga Kerja	

Sumber : <https://elppd.kemendagri.go.id/>

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel 2. 6 Capaian IKK Hasil LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Pendidikan					
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	102,157	DISDIKPORA	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,474	DISDIKPORA	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,279	DISDIKPORA	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	DISDIKPORA	
Kesehatan					
	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,024	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,943	DINKES PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,943	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,202	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,254	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	89,085	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,394	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,59	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,817	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	96,299	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan	100	DINKES PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
		TBC sesuai standar			
	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	DINKES PPKB	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai (Pemecah Ombak) di WS Kewenangan Kab/Kota	100	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76,305	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	96,838	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,271	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	73,829	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	DPU PR	
Perumahan Rakyat					
	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	DISPERKIMHUB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Perumahan Rakyat	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	21,977	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,016	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1,063	DISPERKIMHUB	
Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD	
	Ketentraman dan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	100	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Ketertiban Umum	penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	92	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,1	Satpol PP	
Sosial					
	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	99,744	DINSOS P3A	
	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	DINSOS P3A	
Tenaga Kerja					
	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,962	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	162.557,661	DISNAKER	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	8,689	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	82,488	DISNAKER	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak					
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25,948	PMD	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	PMD	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	15,835	PMD	
Pangan					
	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan	255,369	DISTAPANG	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
		beras/ jagung sesuai kebutuhan)			
Pertanahan					
	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	BAG. PEMERINTAHAN	
	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	BAG. PEMERINTAHAN	
	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	BAG. PEMERINTAHAN	
	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	BAG. PEMERINTAHAN	
	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	100	BAG. PEMERINTAHAN	
	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	BAG. PEMERINTAHAN	
Lingkungan Hidup					
	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	68,17	DISPERKIMHUB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	60,51	DISPERKIMHUB	
	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	8	DISPERKIMHUB	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,109	DISDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	44,434	DISDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	99,152	DISDUKCAPIL	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	14,583	DISDUKCAPIL	
Pemberdayaan Masyarakat					
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	PMD	
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan status desa mandiri	1,6	PMD	
Keluarga Berencana					
	Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,38	DINSOS P3A	
	Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,844	DINSOS P3A	
	Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,719	DINSOS P3A	
Perhubungan					
	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,82	DISPERKIMHUB	
	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,35	DISPERKIMHUB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Kominfo					
	Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	DISKOMINFO	
	Kominfo	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	38,636	DISKOMINFO	
	Kominfo	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	DISKOMINFO	
Koperasi Usaha Kecil Menengah					
	KUKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	91,899	DISNAKER	
	KUKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0,625	DISNAKER	
Penanaman Modal					
	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	15,581	DPMPTSP	
Pemuda dan Olahraga					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4.685	DISPARBUD	
	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,413	DISPARBUD	
	Pemuda dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	19	DISPARBUD	
Statistik					
	statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	DISKOMINFO	
	statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	DISKOMINFO	
Persandian					
	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	77,674	DISKOMINFO	
Kebudayaan					
	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	DISDIKPORA	
Perpustakaan					
	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	54,3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	95,95	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kearsipan					
	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	77,5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	166,66	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kelautan					
	Kelautan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	101,008	DLHKP	
Pariwisata					
	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	80	DISPARBUD	
	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten/kota	67,938	DISPARBUD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	55,352	DISPARBUD	
	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	5,638	DISPARBUD	
	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,095	DISPARBUD	
Energi Sumber Daya Mineral					
	ESDM	persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin diKabupaten/Kota	100	PROVINSI	
Pertanian					
	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	622,938	DISTAPANG	
	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2,93	DISTAPANG	
Perdagangan					
	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	1,026	DISPERINDAG KUKM	
	Perdagangan	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	0,03	DISPERINDAG KUKM	
	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	68,322	DISPERINDAG KUKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Perindustrian					
	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	0,039	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	11,35	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	100	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (rumus adalah Keterkinian informasi industri + kelengkapan informasi industri) liat juknis	100	DISPERINDAG KUKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Transmigrasi					
	Transmigrasi	Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	10	DISNAKER	

Sumber : data diolah

c. Capaian IKK Untuk fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Urusan Pemerintahan	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Perencanaan dan Keuangan					
	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	27,897	BPKPD	
	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	18,006	BPKPD	
	Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,13	INSPEKTORAT	
	Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	INSPEKTORAT	
	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures	67,917	BPKPD	
	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	8	BPKPD	
Pengadaan					

	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	100	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	199,42	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	73,808	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
Kepegawaian					
	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	95,695	BKPSDM	
	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	13,942	BKPSDM	
	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS	59,709	BKPSDM	

		tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
Manajemen Keuangan					
	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,6865	BPKPD	
	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	25,7693	BPKPD	
	Manajemen Keuangan	Assets Management	Ya	BPKPD	
			Ya	BPKPD	
			Ya	BPKPD	
			Ya	BPKPD	
	Manajemen Keuangan	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9,683	BPKPD	
Transparansi dan Partisipasi Publik					
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	DISKOMINFO	
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	83,333	DISKOMINFO	

Sumber data : data diolah

B. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan tujuan RPJMD, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur keberhasilan sasaran RPJMD dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sementara IKD secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2021 - 2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan / pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. IKD dan IKU sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah.

Berikut kami sajikan rekapitulasi hasil pencapaian indikator sasaran IKU Kabupaten Kebumen :

Tabel 2. 8 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					SB	B	C	K
1	Misi 1	1	3	4	1	2		
2	Misi 2	1	3	5	1	2		
3	Misi 3	2	6	6	4	2		
4	Misi 4	1	2	2	1	1		
5	Misi 5	2	4	4	2	2		
	Jumlah	7	18	21	9	9		
Prosentase (%)					50 %	50%		

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Hasil analisis bahwa dari 7 (tujuh) tujuan, 18 (delapan belas) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja/sasaran, diketahui bahwa 9 (sembilan) indikator sasaran atau 50% pencapaiannya dengan kriteria **Sangat Baik**, 9 (sembilan) indikator sasaran atau 50% pencapaiannya dengan kriteria **Baik**, sehingga dapat disimpulkan rata-rata realisasi capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 109,69% atau bermakna **Sangat Baik**.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja

Tabel 2. 9 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83,00
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	67,00
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,43
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,60
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,74
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,54
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,25
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.362,9
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.674,7
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.184,6
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	16,00- 17,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,51-5,58
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	53,81
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,10
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	60,71
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	25,05
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2. 10 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	83,00	87,69	105,65
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	67,00	65,49	100
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	100
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,43	3,44	100,29
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,60	73,70	100,14
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,74	7,85	101,42
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,54	13,36	98,67
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,25	93,05	99,79
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.362,9	8.143,7	151,85
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7	7.101,9	163,65
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.674,7	17.356,4	148,67
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.184,6	4.109,0	98,19
11.	Berkurangnya penduduk	Tingkat Kemiskinan	%	16,00-	16,41	103,47

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	miskin			17,00		
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,51-5,58	5,92	93,90
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	53,81	55,34	102,84
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,10	68,17	92,00
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	60,71	100,00	164,72
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	25,05	34,89	139,28
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100
					Rata-Rata	109,69%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2. 11 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,02	83,00	87,69	105,65
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	65,18	67,00	65,49	100
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	100
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,05	3,43	3,44	100,29
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,35	73,60	73,70	100,14
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,55	7,74	7,85	101,42
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,35	13,54	13,36	98,67
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,25	93,05	99,79
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5,090,09	5.362,9	8.143,7	151,85
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7	4.339,7	7.101,9	163,65
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.080,8 1	11.674,7	17.356,4	148,67
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	3.971,70	4.184,6	4.109,0	98,19
11.	Berkurangnya penduduk	Tingkat Kemiskinan	%	17,83	16,00-	16,41	103,47

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	miskin				17,00		
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,03	5,51-5,58	5,92	93,90
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	52,47	53,81	55,34	102,84
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	64,43	74,10	68,17	92,00
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	60,71	100,00	164,72
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	30,00	25,05	34,89	139,28
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2. 12 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,02	83,00	87,69	105,65	86	101,97
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	65,85	67,00	65,49	100	77	85,05
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,05	3,43	3,44	100,29	3,6	95,56
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,35	73,60	73,70	100,14	74	99,59
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,55	7,74	7,85	101,42	8,14	96,44
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,35	13,54	13,36	98,67	13,94	95,84
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,25	93,05	99,79	93,65	99,36
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5,090,09	5.362,9	8.143,7	151,85	6.643,72	122,58
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7	4.339,7	7.101,9	163,65	5.376,15	132,10
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.080,8 1	11.674,7	17.356,4	148,67	14.462,9 5	83,33
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	3.971,70	4.184,6	4.109,0	98,19	5.183,96	79,26

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2021	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	17,83	16,00-17,00	16,41	103,47	13,00-13,50	78,44
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,03	5,51-5,58	5,92	93,90	5,10-5,20	75,67
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	52,47	53,81	55,34	102,84	70,69	78,29
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	64,43	74,10	68,17	92,00	74,45	91,56
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	60,71	100,00	164,72	78,57	127,28
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	30,00	25,05	34,89	139,28	43,05	81,04
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas atas penggunaan sumberdaya yang ada. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu capaian SPM dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah - rendahnya.

Gambar 1. Perhitungan Efisiensi Anggaran

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E	: Efisiensi
PAKi	: Pagu anggaran keluaran i
RAKi	: Realisasi anggaran keluaran i
CKi	: Capaian keluaran i

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu perangkat daerah misalnya biaya dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Efisiensi Anggaran anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 13 Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
	Tujuan								
1	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	102,41%						
	Sasaran								
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,65%	Program Pendaftaran Penduduk	2.870.525.000	2.704.388.467	Cakupan Pendaftaran Penduduk	100,00%	5,79%
				Program Pencatatan Sipil	310.815.000	301.521.568	Cakupan Pendaftaran Penduduk	100,00%	2,99%
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.455.657.000	1.452.348.132	Presentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	0,23%
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	86.929.000	85.612.254	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00%	1,51%
				Program Administrasi Umum (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	45.731.763.000	4.371.796.402	Nilai IKM Sekretariat Daerah	104,25%	90,83%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10.868.634.000	10.609.284.329	Nilai EKPPD	127,30%	23,32%
				Program Perekonomian dan Pembangunan	2.206.039.000	2.054.841.866	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	101,99%	8,67%
				Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	40.401.806.000	38.189.094.161	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan kesekretariatan DPRD	100,00%	5,48%
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.347.369.000	13.116.441.732		100,00%	14,54%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.529.693.000	6.098.418.533	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	6,60%
				Program Kepegawaian Daerah	1.394.750.000	1.156.207.952	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	110,00%	24,64%
				Program Pengembangan	2.449.000.000	242.430.953	Persentase ASN yang Meningkat	101,86%	90,28%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Sumber Daya Manusia			Kapasitasnya		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76.835.067.000	7.189.386.648	Indeks kondusifitas Kecamatan	100,00%	90,64%
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.640.180.000	1.615.693.216	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	104,25%	5,51%
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10.341.919.000	9.721.130.125	Indeks Kepuasan masyarakata terhadap pelayanan publik di kelurahan	102,92%	8,67%
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	480.910.000	472.049.280	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	1,84%
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.917.331.000	278.733.128	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	100,00%	90,45%
1.2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	1 Nilai SAKIP	97,75%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	187.210.000	183.793.289	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	101,67%	3,44%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran		Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
		2	Opini BPK	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.227.061.000	3.147.226.595	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	2,47%
					Program Pengelolaan Arsip	339.853.000	336.741.784	Persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku	101,09%	1,98%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.132.315.000	5.827.172.196	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	4,98%
					Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	703.100.000	692.728.552	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	110,24%	10,63%
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	700.916.000	691.624.379	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah	100,00%	1,33%
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	462.007.000	457.022.350	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	102,77%	3,75%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7.505.537.000	7.482.991.022	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	0,30%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Daerah Kabupaten/Kota					
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	613.055.000	530.482.770	Nilai Leveling APIP	100,00%	13,47%
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	209.751.000	200.463.212	Indeks Persepsi Korupsi	111,98%	14,65%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	22.017.848.000	21.256.027.880	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	3,46%
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	638.594.939.000	636.701.209.511	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	0,30%
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.727.363.000	1.684.858.559	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	2,46%
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.584.531.000	5.434.858.737	Prosentase capaian Pendapatan Asli Daerah	116,43%	16,41%
1.3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	100,29%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.548.658.000	11.898.198.948	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	5,18%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.890.841.000	1.810.853.358	Indeks PPID	102,28%	6,36%
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.461.442.000	2.442.261.461	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	100,00%	0,78%
2	Tujuan								
	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	100,31%						
	Sasaran								
2.1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	100,14%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	474.721.299.000	449.178.734.562	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	5,38%
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	109.578.498.000	104.010.399.620	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100,00%	5,08%
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	2.310.000.000	2.309.514.275	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	100,00%	0,02%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran		Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
					Kesehatan					
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	478.336.000	475.646.879	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100,00%	0,56%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	447.500.000	446.450.051	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	133,56%	25,30%
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	770.124.000	769.090.820	Persentase organisasi pemuda yang aktif	1121,17%	91,09%
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.877.567.000	2.817.590.002	Persentase prestasi Olahraga (persen)	107,95%	9,29%
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	394.428.000	372.452.900	Cakupan prestasi kepramukaan	100,00%	5,57%
2.2.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	101,42%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	844.704.094.000	743.382.972.146	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	11,99%
					Program Pengelolaan Pendidikan	219.505.486.000	209.381.297.451	Angka Partisipasi Kasar	100,11%	4,72%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran		Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	11.813.000	11.764.900	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	100,00%	0,41%
		2	Harapan Lama Sekolah	98,67%						
2.3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1	Indeks Pembangunan Gender	99,8%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	312.531.000	300.898.247	cakupan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	358,84%	73,17%
					Program Perlindungan Perempuan	217.442.000	127.069.000	cakupan program perlindungan perempuan	100,00%	41,56%
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	12.919.000	12.441.100	cakupan program peingkatan kualitas keluarga	147,27%	34,61%
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	30.134.000	29.832.900	cakupan program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak	100,00%	1,00%
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	198.739.000	194.702.654	kategori kabupaten layak anak (KLA)	100,00%	2,03%
					Program Perlindungan Khusus Anak	315.317.000	247.291.412	Cakupan perlindungan khusus anak	100,00%	21,57%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran		Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
					Program Pengendalian Penduduk	351.140.000	309.948.478	Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100,00%	11,73%
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.246.516.000	9.318.030.662	Presentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS	105,91%	14,13%
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.484.415.000	4.314.943.752	Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	140,22%	52,54%
		2	Cakupan Perlindungan Anak	100,0%						
	Tujuan									
3.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah		Pertumbuhan Ekonomi	111,11%						
	Sasaran									
3.1.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor		PDRB ADHK Sektor Primer	151,85%	Program Pengelolaan Perikanan	4.970.030.000	4.069.877.689	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	100,00%	18,11%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
	primer			Tangkap			Tangkap		
				Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.642.267.000	4.347.585.336	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	100,10%	6,44%
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	50.000.000	47.130.300	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	100,00%	5,74%
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	395.221.000	385.372.698	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	433,49%	77,51%
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.184.771.000	5.610.453.008	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	140,63%	35,49%
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.442.232.000	11.823.228.273	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	87,60%	-8,48%
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	976.214.000	877.794.645	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	104,27%	13,76%
				Program Pengendalian dan Penanggulangan	565.000.000	534.549.460	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan	26,05%	-263,22%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Bencana Pertanian			Bencana Pertanian		
				Program Perizinan Usaha Pertanian	100.000.000	96.607.700	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	100,00%	3,39%
				Program Penyuluhan Pertanian	6.511.183.000	4.022.731.347	Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian	100,00%	38,22%
3.2.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	163,65%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.847.715.000	4.472.953.359	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	7,73%
				Program Penataan Desa	80.000.000	79.947.200	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	300,00%	66,69%
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.937.904.000	1.921.908.720	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	100,00%	0,83%
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.919.853.000	6.607.155.999	Jumlah Bumdesa yang meningkat Klasifikasinya	147,83%	35,41%
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	504.178.000	493.881.292	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100,00%	2,04%
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	270.000.000	267.989.779	Persentase Koperasi yang Sehat	100,00%	0,74%
				Program	213.978.000	211.104.496	Persentase SDM	100,00%	1,34%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			Koperasi yang Kompeten		
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	277.834.000	264.598.560	Persentase Advokasi kepada Koperasi	100,00%	4,76%
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.013.295.000	979.065.621	Prosentase Peningkatan UKM yang berkualitas	100,00%	3,38%
				Program Pengembangan UMKM	1.746.122.000	1.545.958.963	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro terbina yang meningkat Omsetnya	100,00%	11,46%
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	877.000.000	828.816.510	Meningkatnya Pertumbuhan Industri IKM di wilayah Kab Kebumen	125,00%	24,40%
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	250.000.000	249.615.900	Meningkatnya jumlah dokumen perijinan industri industri yang terfasilitasi	100,00%	0,15%
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.000.000	98.846.391	Terinformasikannya Jumlah Dokumen Informasi Industri	100,00%	1,15%
3.3.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	148,67%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	7.303.014.000	6.747.361.490	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	7,61%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Daerah Kabupaten/Kota					
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.050.556.000	7.775.978.209	Bertambahnya fasilitas sarana, /prasarana obyek wisata (obwis)	100,00%	3,41%
				Program Pemasaran Pariwisata	1.244.321.000	1.214.238.775	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (persen)	66,94%	-45,78%
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	125.000.000	120.421.172	Terfasilitasinya program pengembangan pariwisata dan kebudayaan (kegiatan)	100,00%	3,66%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.548.658.000	11.898.198.948	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	5,18%
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.644.602.000	4.578.713.187	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar, Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	100,00%	1,42%
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	873.408.000	830.189.705	Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	100,00%	4,95%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Program Pengembangan Ekspor	250.000.000	244.443.030	Jumlah Nilai Ekspor IKM	100,00%	2,22%
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	350.000.000	346.775.551	terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar luar negeri dan terciptanya eksportir (pameran trade ekspor indonesia)	100,00%	0,92%
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	300.000.000	296.044.725	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	100,00%	1,32%
3.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	98,19%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.630.968.000	4331722642	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	6,46%
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	145.000.000	132.357.937	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	142,23%	35,82%
				Program Promosi Penanaman Modal	240.000.000	237.325.700	Jumlah dokumen promosi penanaman modal kabupaten/kota	100,00%	1,11%
				Program Pelayanan Penanaman Modal	373.330.000	344.619.719	Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan	100,00%	7,69%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
							perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	410.216.000	391.811.865	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	100,00%	4,49%
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	40.000.000	40.000.000	Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	100,00%	0,00%
				Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	30.000.000	28.465.556		100,00%	5,11%
	Tujuan								
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	91,32%						
	Sasaran								
4.1.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	103,47%	Program Penunjang Urusan	4.594.688.000	4.212.950.155	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	8,31%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				Program Pemberdayaan Sosial	78.869.000	77.639.010	prosentase peningkatan kemampuan SDM Kesos	100,00%	1,56%
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	10.000.000	9.999.150	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00%	0,01%
				Program Rehabilitasi Sosial	1.679.477.000	1.602.093.291	Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	103,96%	8,24%
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.337.853.000	1.972.227.110	cakupan perlindungan jaminan sosial	85,72%	1,58%
				Program Penanganan Bencana	1.192.710.000	1.179.720.715	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten kota	100,00%	1,09%
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	14.400.000	14.373.100	prosentase TMP yang di kelola	100,00%	0,19%
				Program Penunjang	20.992.365.000	18.905.585.962	Cakupan pelayanan penunjang urusan	100,00%	9,94%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			pemerintahan daerah		
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	8.535.000.000	8.257.846.895	Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan	108,19%	10,57%
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.191.000.000	1.117.198.362	Persentase diverifikasi dan ketahanan pangan	100,00%	6,20%
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	558.000.000	483.638.680	Persentase Desa yang tertangani kerawanan pangan	100,00%	13,33%
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	145.000.000	142.510.262	Persentase Hasil Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,06%	1,77%
4.2.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	93,91%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.445.011.000	6.104.098.044	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	5,29%
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	997.159.000	985.926.613	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai "A"	100,00%	1,13%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Program Penempatan Tenaga Kerja	1.443.806.000	1.430.062.441	Prosentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja terdaftar	262,56%	62,28%
				Program Hubungan Industrial	129.155.000	128.502.821	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian	100,00%	0,50%
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	170.000.000	168.425.154	Jumlah Keluarga Miskin daerah bencana yang difasilitasi perpindahannya ke daerah transmigrasi	142,86%	30,65%
	Tujuan								
5	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	98,8%						
	Sasaran								
5.1.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	102,84%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.897.489.000	22.289.776.711	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	2,65%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.134.132.000	8.732.680.925	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	98,08%	26,63%
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.409.857.000	7.474.558.359	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	117,65%	24,46%
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	7.262.895.000	7.104.333.600	Prosentase Drainase Dalam Kondisi Baik	100,00%	2,18%
				Program Penataan Bangunan Gedung	4.806.000.000	4.472.812.864	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	100,00%	6,93%
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.061.000.000	3.038.296.475	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	100,00%	0,74%
				Program Penyelenggaraan Jalan	122.414.582.000	118.227.222.918	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	98,87%	2,31%
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	343.869.000	340.643.664	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	104,44%	5,15%
				Program Penyelenggaraan	1.281.682.000	1.158.606.473	Persentase Kesesuaian Lahan	100,00%	9,60%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Penataan Ruang			dengan Pola Ruang RTRW		
				Program Pengembangan Perumahan	960.125.000	948.534.329	Cakupan rumah layak huni	100,00%	1,21%
				Program Kawasan Permukiman	582.000.000	576.334.246	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	69,34%	-42,81%
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.908.926.000	2.748.277.688	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	144,91%	34,80%
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.760.854.000	5.713.204.312		100,00%	0,83%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.408.346.000	7.837.069.231	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	6,79%
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	27.871.630.000	27.390.346.365	Indeks Infrastruktur Perhubungan	101,84%	3,50%
5.2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	92,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.157.200.000	12.919.353.430	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	1,81%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
	masyarakat			Kabupaten/Kota					
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	341.000.000	329.154.234	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	116,66%	17,26%
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.553.485.000	2.511.319.512	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	92,00%	-6,90%
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.720.050.000	3.525.858.300	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	100,00%	5,22%
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	110.000.000	106.092.775	Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	100,00%	3,55%
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan	179.210.000	171.814.144	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	105,03%	8,72%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	199.940.000	186.171.940	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	101,66%	8,41%
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	113.850.000	111.343.161	Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup	100,00%	2,20%
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	53.819.000	46.584.516	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100,00%	13,44%
				Program Pengelolaan Persampahan	9.079.790.000	8.813.383.708	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	102,50%	5,30%
	Tujuan								
6.	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	105,05%						
	Sasaran								

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
6.1.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	164,72%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.390.444.000	3.193.100.760	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	5,82%
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	333.247.000	319.250.950	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1120,49%	91,45%
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.562.889.000	3.540.295.444	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum	100%	0,63%
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	37.764.000	37.451.200	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00%	0,83%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.645.941.000	1.615.014.050	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	827,07%	88,14%
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	212.099.000	207.421.922	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	164,72%	40,63%
6.2.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	139,28%	Program Pengembangan Kebudayaan	1.912.000.000	1.876.678.472	Persentase fasilitas pengelolaan keragaman budaya	101,11%	2,93%
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	336.350.000	288.685.100	Banyaknya fasilitas pengelolaan keragaman budaya	100,00%	14,17%
	Tujuan								
7.	Mewujudkan kondusivitas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	100,00%						
	Sasaran								
7.1.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100,00%	Program Penunjang Urusan	7.185.833.000	6.976.121.711	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	2,92%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.873.677.000	3.711.920.973	Persentase Penegakan Perda; Persentase terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan; persentase terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal;	100,00%	4,18%
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.846.419.000	1.815.971.910	Persentase kesiapsiagaan Damkar; Presentase Respon time pemadaman kebakaran ; kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran ;	100,00%	1,65%
7.2.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.939.201.000	3.812.698.097	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	3,21%
				Program Penanggulangan	5.736.135.000	5.678.681.221	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00%	1,00%

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Tujuan/ Sasaran %	Program	Anggaran	Realisasi	Indikator Program	Capaian Program %	Efisiensi
				Bencana					
Rata-rata			109,69 %		Total Efisiensi				11,01%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka **11,01%** dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%)

Ditinjau dari aspek efisiensi, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
	Tujuan						
1	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	102,41 %				
	Sasaran						
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	105,65 %	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pendaftaran Penduduk	100,00 %	Menunjang
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pendaftaran Penduduk	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	100,00 %	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Program Administrasi Umum (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Nilai IKM Sekretariat Daerah	104,25 %	Menunjang
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai EKPPD	127,30 %	Menunjang
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	101,99 %	Menunjang
				Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota (Menggunakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan kesekretariatan DPRD	100,00 %	Menunjang
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100,00 %	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	110,00 %	Menunjang
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	101,86 %	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kondusifitas Kecamatan	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	102,92 %	Menunjang
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan masyarakat masyarakata terhadap pelayanan publik di kelurahan		Menunjang
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Katagori Maju dan Mandiri	100,00 %	Menunjang
1.2 .	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	1	Nilai SAKIP	97,75%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	101,67 %	Menunjang
		2	Opini BPK	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku	101,09 %	Menunjang
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Kab/Kota	daerah		
				Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	110,24 %	Menunjang
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	102,77 %	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Leveling APIP	100,00 %	Menunjang
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Persepsi Korupsi	111,98 %	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase capaian Pendapatan Asli Daerah	116,43 %	Menunjang
1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	100,29 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
					daerah		
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks PPID	102,28 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	100,00 %	Menunjang
2	Tujuan						
	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	100,31 %				
	Sasaran						
2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	100,14 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	Menunjang
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100,00 %	Menunjang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	100,00 %	Menunjang
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100,00 %	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	133,56 %	Menunjang
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	1121,17 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase prestasi Olahraga (persen)	107,95 %	Menunjang
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan prestasi kepramukaan	100,00 %	Menunjang
2.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1 Rata-rata Lama Sekolah	101,42 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar	100,11 %	Menunjang
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno	100,00 %	Menunjang
		2 Harapan Lama Sekolah	98,67%				
2.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1 Indeks Pembangunan Gender	99,8%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	cakupan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	358,84 %	Menunjang
				Program Perlindungan Perempuan	cakupan program perlindungan perempuan	100,00 %	Menunjang
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	cakupan program peningkatan kualitas keluarga	147,27 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	cakupan program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak	100,00 %	Menunjang
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	kategori kabupaten layak anak (KLA)	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator		Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
					Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungankhusus anak	100,00 %	Menunjang
					Program Pengendalian Penduduk	Prosentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100,00 %	Menunjang
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS	105,91 %	Menunjang
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	140,22 %	Menunjang
		2	Cakupan Perlindungan Anak	100,0%				
	Tujuan							
3.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah		Pertumbuhan Ekonomi	111,11 %				
	Sasaran							
3.1 .	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer		PDRB ADHK Sektor Primer	151,85 %	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	100,00 %	Menunjang
					Pogram Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	100,10 %	Menunjang
					Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
					sumberdaya perikanan		
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	433,49 %	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	140,63 %	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	87,60%	Menunjang
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	104,27 %	Menunjang
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	26,05%	Menunjang
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	100,00 %	Menunjang
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase skor kinerja penyuluhan pertanian	100,00 %	Menunjang
3.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	163,65 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Penataan Desa	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	300,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	100,00 %	Menunjang
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdesa yang meningkat Klasifikasinya	147,83 %	Menunjang
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100,00 %	Menunjang
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat	100,00 %	Menunjang
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	100,00 %	Menunjang
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi	100,00 %	Menunjang
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UKM yang berkualitas	100,00 %	Menunjang
				Program Pengembangan UMKM	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Mikro terbita yang meningkat Omsetnya	100,00 %	Menunjang
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Pertumbuhan Industri IKM di wilayah Kab Kebumen	125,00 %	Menunjang
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Meningkatnya jumlah dokumen perijinan industri industri yang terfasilitasi	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan	Terinformasinya Jumlah	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Sistem Informasi Industri Nasional	Dokumen Informasi Industri		
3.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	148,67 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bertambahnya fasilitas sarana, /prasarana obyek wisata (obwis)	100,00 %	Menunjang
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (persen)	66,94%	Menunjang
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya program pengembangan pariwisata dan kebudayaan (kegiatan)	100,00 %	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar, Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	100,00 %	Menunjang
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar	100,00 %	Menunjang
				Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Nilai Ekspor IKM	100,00 %	Menunjang
				Program Standardisasi dan	terlaksananya pengembangan informasi	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Perlindungan Konsumen	peluang pasar luar negeri dan terciptanya eksportir (pameran trade ekspor indonesia)		
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	100,00 %	Menunjang
3.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	98,19%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	142,23 %	Menunjang
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen promosi penanaman modal kabupaten/kota	100,00 %	Menunjang
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100,00 %	Menunjang
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		100,00 %	Menunjang
	Tujuan						
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	91,32%				
	Sasaran						
4.1	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	103,47 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Pemberdayaan Sosial	prosentase peningkatan kemampuan SDM Kesos	100,00 %	Menunjang
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00 %	Menunjang
				Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	103,96 %	Menunjang
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan jaminan sosial	85,72%	Menunjang
				Program Penanganan Bencana	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah kabupaten kota	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	prosentase TMP yang di kelola	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa yang tertangani kedaulatan dan kemandirian pangan	108,19 %	Menunjang
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase diversifikasi dan ketahanan pangan	100,00 %	Menunjang
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa yang tertangani kerawanan pangan	100,00 %	Menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Hasil Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,06 %	Menunjang
4.2	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	93,91%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai "A"	100,00 %	Menunjang
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja/pencari kerja terdaftar	262,56 %	Menunjang
				Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian	100,00 %	Menunjang
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Keluarga Miskin daerah bencana yang	142,86 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
					difasilitasi perpindahannya ke daerah transmigrasi		
	Tujuan						
5	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	98,8%				
	Sasaran						
5.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	102,84 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	98,08%	Menunjang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	117,65 %	Menunjang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase Drainase Dalam Kondisi Baik	100,00 %	Menunjang
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	100,00 %	Menunjang
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	100,00 %	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten	98,87%	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
					dalam Kondisi Mantap		
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	104,44 %	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	100,00 %	Menunjang
				Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah layak huni	100,00 %	Menunjang
				Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	69,34%	Menunjang
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	144,91 %	Menunjang
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		100,00 %	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	101,84 %	Menunjang
5.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	92,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	116,66 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
					hidup		
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	92,00%	Menunjang
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	100,00 %	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	105,03 %	Menunjang
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	101,66 %	Menunjang
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup	100,00 %	Menunjang
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100,00 %	Menunjang
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	102,50 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
	Tujuan						
6.	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	105,05 %				
	Sasaran						
6.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	164,72 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1120,49 %	Menunjang
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum	100%	Menunjang
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan		
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	827,07 %	Menunjang
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	164,72 %	Menunjang
6.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	139,28 %	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase fasilitasi pengelolaan keragaman budaya	101,11 %	Menunjang
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Banyaknya fasilitas pengelolaan keragaman budaya	100,00 %	Menunjang
	Tujuan						
7.	Mewujudkan kondusivitas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	100,00 %				Menunjang
	Sasaran						
7.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100,00 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda; Persentase terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan; persentase terlaksananya kegiatan upaya pencegahan	100,00 %	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Capaian %	Program	Indikator Program	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
					tindak kriminal;		
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kesiapsiagaan Damkar; Presentase Respon time pemadaman kebakaran ; kesiapsiagaan SDM Damkar dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran ;	100,00 %	Menunjang
7.2 .	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	Menunjang
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100,00 %	Menunjang
Rata-rata			109,69 %			255,45 %	

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 125 (seratus dua puluh lima) Program dengan rata-rata capaian kinerja 255,45% menunjang tercapainya 28 (dua puluh delapan) indikator tujuan/ sasaran dengan rata-rata capaian indikator kinerja tujuan/sasaran sebesar **109,69%** atau Kategori Kinerja **Sangat Baik**.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3.1.1. Target Kinerja

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen adalah DIPA-090.02.4.039600/2022 tanggal 4 Februari 2022 diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan melalui Program Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, Rincian Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) untuk pembangunan Pasar Kutowinangun II di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

3.1.2. Realisasi

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 4.000.000.000,- terealisasi Rp. 3.996.689.600,- atau sebesar 99,92%.

Tabel 3. 1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2022

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementrian Perdagangan RI	DIPA-090.02.4.039600/2022	Program Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan / Output Pembangunan/R evitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen	4.000.000.000	3.996.689.600	99,92%	1	100%	

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

B. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

i) Target Kinerja

Tidak ada tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditargetkan.

ii) Realisasi

Tidak ada realisasi karena tidak terdapat tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

C. Permasalahan dan Kendala

Tidak terdapat permasalahan dan kendala.

D. Saran dan Tindaklanjuti

Tidak ada.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUD	100%
			Jumlah anak usia dini pada kabupaten/kota bersangkutan	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	anak usia 7 - 12 tahun yang sudah atau sedang belajar	100%
			jumlah anak usia 7 - 12 tahun	
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	anak usia 7 - 18 yang sedang atau sudah belajar pada pendidikan kesetaraan	100%
			jumlah anak usia 7 - 18	

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kebumen Tahun 2022

4.1.3. Realisasi

Adapun realisasi pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	CAPAIAN (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUD	42.131	100
			Jumlah anak usia dini pada kabupaten/kota bersangkutan	42.131	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	anak usia 7 - 12 tahun yang sudah atau sedang belajar	135.862	100
			jumlah anak usia 7 - 12 tahun	135.862	
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	anak usia 7 - 18 yang sedang atau sudah belajar pada pendidikan kesetaraan	945	100
			jumlah anak usia 7 - 18	945	

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2022

4.1.4. Alokasi anggaran

Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kebumen dalam rangka penerapan dan Pencapaian SPM sebesar Rp.157.244.858.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 151.956.665.047,- atau sebesar 96,63%.

4.1.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan SPM bidang pendidikan secara umum berasal dari seluruh pegawai di bawah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, dimana pada Tahun 2022 berjumlah 206 orang di Dinas dan guru di satuan pendidikan 5.759 orang di SD dan SMP 2.265 orang. Selain itu dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 130/329 Tahun 2022 Tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kebumen.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian SPM Pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Sebagian peserta didik baru kelas 1 (satu) jenjang SD/MI masih berusia dibawah 7 (tujuh) tahun (5-6 tahun)
2. Terdapat anak usia sekolah 12-15 tahun di Ponpes tanpa mengikuti pendidikan SMP/MTs/Sederajat
3. Faktor kemiskinan
4. Anak Putus Sekolah (Pernikahan di usia dini, bekerja dll)

b. Solusi

1. Sosialisasi Gerakan Kembali Bersekolah
2. Beasiswa Kurang Mampu (BKM), Program Indonesia Pintar (PIP).
3. Melaksanakan program pendidikan kesetaraan melalui penguatan PKBM.

B. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Adapun target pencapaian SPM Kesehatan tahun 2022 di Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 3 Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil di suatu kabupaten/kota yang mendapat pelayanan	100%
			Jumlah ibu hamil di suatu kabupaten/kota	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan di wilayah kerja kabupaten / kota bersangkutan	100%
			Jumlah ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten / kota bersangkutan.	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	- Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan	100%
			- Jumlah bayi baru lahir	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
			- Jumlah balita usia 12 - 59 bulan	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	100%
			- Jumlah anak usia pendidikan dasar	
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kabupaten atau kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%
			- Jumlah orang usia 15 - 59 tahun	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat pelayanan	100%
			- Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	- Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan	100%
			- Jumlah penderita hipertensi	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes mellitus	100%
			- Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	- Jumlah ODGJ mendapat pelayanan	100%
			- Jumlah ODGJ	
11	Pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan	- Jumlah orang terduga TBC mendapat pelayanan	100%
			- Jumlah orang terduga TBC	
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV	- Jumlah orang dengan resiko HIV yang mendapat pelayanan	100%
			- Jumlah orang dengan resiko HIV	

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2022

4.2.3. Realisasi

Adapun realisasi pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil di suatu kabupaten/kota yang mendapat pelayanan	17.549	99,94%
			Jumlah ibu hamil di suatu kabupaten/kota	17.559	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan di wilayah kerja kabupaten / kota bersangkutan	17.549	99,94%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	CAPAIAN (%)
		persalinan	Jumlah ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten / kota bersangkutan.	17.559	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan	17.412	99,20%
			Jumlah bayi baru lahir	17.552	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93.463	96,25%
			Jumlah balita usia 12 - 59 bulan	97.100	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	186.457	100%
			Jumlah anak usia pendidikan dasar	186.457	
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kabupaten atau kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	522.145	89,09%
			Jumlah orang usia 15 - 59 tahun	586.118	
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lansia	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan	163.271	93,39%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	CAPAIAN (%)
		skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas	174.927	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan	87.026	97,59%
			Jumlah penderita hipertensi	89.175	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes mellitus	11.858	98,82%
			Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus	12.000	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ mendapat pelayanan	4.033	96,30%
			Jumlah ODGJ	4.188	
11	Pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan	Jumlah orang terduga TBC mendapat pelayanan	13.624	100%
			Jumlah orang terduga TBC	13.624	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko HIV yang mendapat pelayanan	22.318	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	CAPAIAN (%)
	melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko HIV	22.318	

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2022

4.2.4. Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kebumen dalam rangka penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan dengan Pagu sebesar Rp. 23.985.564.000,- dengan realisasi Rp. 23.315.966.501,- atau capaian 97,21%.

4.2.5. Dukungan Personil

Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan secara umum berasal dari seluruh pegawai dan tenaga medis dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sebagaimana rincian table sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Dukungan Personel Pelaksanaan SPM Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1.	Kesehatan ibu hamil	Persentase ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	17.549	826
2.	sehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	17.549	434
3.	sehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	17.412	599
4.	sehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	93.463	635
5.	sehatan pada usia pendidikan	Persentase anak	186.457	635

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
		usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard		
6.	sehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	522.145	175
7.	sehatan pada usia lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standard	163.371	635
8.	sehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87.026	140
9.	sehatan penderita diabetes s	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.858	175
10.	sehatan orang dengan uan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	4.033	76
11.	sehatan orang terduga ulosis; dan	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	13.624	235
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV Mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	22.318	47 Layanan VCT terdiri dari: 35 Puskesmas 1 KP3 2 RSUD 9 RS Swasta 235 orang

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenc Kabupaten Kebumen, 2022

Selain itu dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 130 / 329 Tahun 2022 Tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kebumen.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Kehamilan yang tidak diinginkan, masih ada fasyankes yang belum melaporkan pelayanan kehamilan, sosial budaya (percaya dukun)
2. Masih ada persalinan yang ditolong sendiri/keluarga dan oleh dukun bayi karena kehamilan yang disembunyikan
3. Kematian bayi usia perinatal (I minggu pertama) tinggi sehingga tidak tercapai KN 3 (28 hari)
4. Mobilitas balita sehingga tidak rutin ditimbang, belum adanya integrasi antara SDIDTK dengan TK PAUD
5. Jumlah sasaran sangat banyak, beban petugas yang menangani banyak program dan kurangnya peran desa dalam menggerakkan masyarakat
6. Belum optimalnya pelaporan penderita HT utamanya dari dokter/klinik swasta
7. Pelaporan dari Balai Pengobatan Swasta/klinik belum optimal, belum semua penderita terlapor
8. Keluarga ODGJ memilih pengobatan alternatif, ODGJ sulit minum obat, Kondisi keluarga menerima ODGJ apa adanya sehingga enggan berobat dan dianggap tidak mengganggu

b. Solusi

1. Optimalisasi program sebelum hamil (KB, Peningkatan Puskesmas PKPR, Pelayanan khusus calon pengantin, Penyuluhan Kespro, Optimalisasi SIMKIA dan Ekohort, Kerjasama lintas sektor/ LP
2. Pendampingan 1 kader 1 ibu hamil, kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga/suami, kerjasama lintas sektor, sarana antar jemput ibu hamil/bersalin
3. Peningkatan kelas ibu hamil/ibu balita, Pelatihan MTBS, MTBM, Integrasi KN dengan MTBM
4. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader dalam pelaksanaan SDIDTK, Peningkatan petugas kesehatan, kader, dan guru TK PAUD dalam SDIDTK, pelatihan kader kesehatan, Kegiatan Lintas Sektor dan Lintas Program
5. Mendekatkan pelayanan kesehatan lansia (kunjungan rumah, posyandu lansia keliling atau pindah lokasi pemeriksaan) pelatihan kader lansia, pemenuhan reagen pemeriksaan lansia
6. Penguatan pelaporan dengan peningkatan jejaring PTM utamanya klinik/dokter swasta
7. Meningkatkan gerakan skrining Posbindu desa untuk menjangkau penderita DM
8. Meningkatkan jejaring dengan klinik swasta, balai pengobatan swasta dan tempat pengobatan lain.
9. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat, pemantauan minum obat.

C. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Target pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1.	penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari- hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat/rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam sebuah Kab./Kota	100
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kab./Kota tersebut	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	resentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPALD	100
			Jumlah rumah yang ada di kabupaten / kota	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022

4.3.3. Realisasi

Tabel 4. 7 Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1.	penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari- hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap air minum melalui	Jumlah kumulatif masyarakat/rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam sebuah Kab./Kota	447.218	97%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
		SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kab./Kota tersebut	461.823	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	resentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPALD	274.162	77%
			Jumlah rumah yang ada di kabupaten / kota	354.807	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022

4.3.4. Alokasi Anggaran

Adapun pagu anggaran untuk pelaksanaan pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021 adalah Rp 14.171.206.000,- dengan realisasi sebesar Rp 14.171.206.000,- atau capaian sebesar 100%.

4.3.5. Dukungan Personil

Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4. 8 Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1.	butuhan pokok air sehari-hari	Persentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	385.618	515 orang Terdiri dari: DPUPR: 10 orang; PDAM: 79 orang; Dinkes: 35 orang; Fasilitator Pamsimas: 23 orang; KPSPAMS: 368 orang
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	274.162	10 orang dan 2 armada dibawah koordinasi Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, 2022

Selain dukungan personil diatas juga terdapat peran seluruh warga masyarakat, kemudian dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 130/329 Tahun 2022 Tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kebumen.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Terbatasnya sumber mata air bersih;
2. Kondisi geografis kabupaten Kebumen;
3. Sumber akses air minum belum layak;
4. Masih terdapat warga yang belum mendapatkan pelayanan akses air minum layak; dan

5. Masih banyak masyarakat yang belum punya tangki septik yang standar/SNI (berkisar 25%) sehingga pengolahan lumpur tinja belum maksimal.

b. Solusi

1. Penyediaan SPAM regional bersama;
2. Pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM regional bersama;
3. Peningkatan kualitas akses air minum layak secara berkala; dan
4. Dengan program DAK Sanitasi masyarakat akan membuat Tangki septik yang sesuai standar SNI

D. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 9 Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	100
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah	Rumah Tangga penerima Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan /atau bangunan + Rumah Tangga penerima Subsidi uang sewa + Rumah Tangga penerima Penyediaan rumah layak huni	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
	Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

4.4.3. Realisasi

Tabel 4. 10 Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	21	100
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	21	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/kota	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Rumah Tangga penerima Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan /atau bangunan + Rumah Tangga penerima Subsidi uang sewa + Rumah Tangga penerima Penyediaan rumah layak huni	23	100
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	23	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2022

4.4.4. Alokasi Anggaran

Adapun pagu anggaran untuk pelaksanaan pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2022 adalah Rp 4.100.051.000,- dengan realisasi sebesar Rp4.100.051.000,- atau capaian sebesar 100%.

4.4.5. Dukungan Personil

Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4. 11 Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Tahun 2022

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	21	Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat secara umum berasal dari pegawai Bidang Perumahan Dinas DISPERKIMHUB Kab.Kebumen dimana pada tahun 2022 jumlah personil sebanyak 23 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan 12 orang.
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	23	jumlah personil sebanyak 23 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan 12 orang.

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 2022

Selain personil diatas didukung juga oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 130/329 Tahun 2022 Tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kebumen.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM perumahan rakyat adalah Penanganan rumah korban bencana tidak dapat segera dilaksanakan setelah terjadi bencana

b. Solusi

1. Solusi dalam penyelesaian masalah tersebut yakni penanganan rumah korban bencana dilakukan pada tahun N+1 melalui proses Perencanaan dalam dokumen perencanaan daerah dan penganggaran dalam APBD.

E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

a. Jenis pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

b. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 12 Target Pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kabupaten/kota dan Perda serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik	100
			Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan Perkada	
2.	Pelayanan informasi rawan	Presentase jumlah penduduk dikawasan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi rawan	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
	bencana	rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	bencana sesuai jenis ancaman bencana tingkat Kab./Kota Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana tingkat Kab./Kota	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana Daerah Kabupaten Kota jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana tingkat Kab./Kota	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tingkat Kab./Kota Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana tingkat Kab./Kota	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Prosentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat Kab./Kota Jumlah Warga Negara yang mejadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran tingkat Kab./Kota	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2022

c. Realisasi

Tabel 4. 13 Realisasi Pencapaian SPM Trantibumlinmas Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Jumlah dan identitas Warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kabupaten/kota dan Perda serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik	1	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
			Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan Perkada	1	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana tingkat Kab./Kota	726.453	100%
			Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana tingkat Kab./Kota	726.453	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana Daerah Kabupaten Kota	2.902	100%
			jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana tingkat Kab./Kota	2.902	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tingkat Kab./Kota	22.099	100%
			Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana tingkat Kab./Kota	22.099	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Prosentase (%) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat Kab./Kota	50	100%
			Jumlah Warga Negara yang mejadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran tingkat Kab./Kota	50	

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2022

d. Alokasi Anggaran

Adapun pagu anggaran untuk pelaksanaan pencapaian SPM Trantibum Tahun 2022 adalah Rp 9.898.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp9.570.964.350,- atau capaian sebesar 97%.

e. Dukungan Personil

Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang trantibumlinmas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4. 14 Dukungan Personil Penerapa SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2022

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1	21 orang Dibawah koordinasi Satpol PP Kab. Kebumen
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	726.453	43 orang (karyawan BPBD)
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.902	43 orang (karyawan BPBD)
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22.099	578 orang (Relawan)
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	703	210 orang dibawah koordinasi Satpol PP Kab. Kebumen

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen, 2022

f. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum semua warga masyarakat memahami terhadap pelayanan ganti rugi akibat penegakan Perda/Perkada;
2. Banyaknya desa rawan bencana menyebabkan banyaknya peralatan EWS bencana dan papan rambu kebencanaan yang harus di pasang;
3. Banyaknya warga dan aparat yang belum di tingkatkan kapasitasnya akan kebencanaan;
4. Jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan bencana belum terkordinasi dengan baik; dan
5. Belum seluruh wilayah Kab Kebumen terjangkau *respon time* 15 menit.

b. Solusi

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah kepada masyarakat;
2. Mendorong desa yang berada di daerah rawan bencana untuk memasang Papan Rambu kebencanaan dengan menggunakan anggota Desa;
3. Mendorong agar desa menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi warganya yang berada di daerah yang berisiko terjadi bencana;
4. Memberikan fasilitasi bagi organisasi relawan untuk peningkatan kapasitas dan berkoordinasi sesama organisasi relawan; dan
5. Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran.

F. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Kabupaten Kebumen terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 15 Target Pencapaian SPM Sosial Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100
			populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten /kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100
			populasi anak terlantar di daerah kabupaten /kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100
			populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten /kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100
			populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten /kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten /kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET (%)
	tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten /kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Tahun 2022

4.6.3. Realisasi

Tabel 4. 16 Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	720	99,59
			populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten /kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	723	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	130	100
			populasi anak terlantar di daerah kabupaten /kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	130	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	195	100
			populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten /kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	195	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA	REALISASI (%)
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	125	100
			populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten /kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	125	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%)korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten /kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.500	100
			populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten /kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	1.500	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kebumen Tahun 2022

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mencapai SPM Sosial Tahun 2022 sebesar Rp. 2.335.610.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.326.718.134,- atau dengan capaian 99,61%.

4.6.5. Dukungan Personil

Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 17 Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2022

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti social	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	720	271 orang
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti social	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	130	271 orang
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti social	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	195	271 orang
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti social	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	125	271 orang
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase %) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	1.500	337 orang

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial secara umum berasal dari seluruh pegawai di lingkungan Dinsos P3A Kabupaten Kebumen serta masyarakat dan perangkat di Kecamatan di Kabupaten Kebumen. Selain itu dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang merata dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 130/329 Tahun 2022 Tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kebumen.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Verifikasi dan validasi data penerima sasaran pelayanan SPM penyandang SPM, penyandang disabilitas mental rentan kambuh (khusus disabilitas mental);
2. Masih terhambatnya pemasaran produk hasil pelatihan;
3. Terkendala faktor permodalan;
4. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar tidak memiliki rumah layak huni, tidak memiliki anggota keluarga, diterlantarkan oleh keluarga dan tidak mampu mengurus dirinya;
5. Penyandang disabilitas mental rentan kambuh (khusus untuk disabilitas mental)
6. Rendahnya akses lapangan kerja; dan
7. Rendahnya tingkat ketrampilan

b. Solusi

- a. Memaksimalkan verifikasi dan validasi data penerima sasaran pelayanan;
- b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak keluarga, desa, dan puskesmas saling memonitor;
- c. Mempromosikan produk hasil pelatihan;
- d. Mencarikan mitra usaha/pemberi modal;
- e. Dirujuk ke panti khusus lansia, permohonan bedah rumah (jika memiliki hak tanah), pemberian permakanan; dan
- f. Pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian pelatihan, peningkatan ketrampilan, bimbingan rohani/spiritual, pemeriksaan kesehatan rutin.

4.7. Program dan Kegiatan

Capaian SPM di Kabupaten Kebumen tahun 2021 didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan pendukung :

a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD

2. Pendidikan Dasar dengan kegiatan pendukung :

a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

- b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 3. Pendidikan Kesetaraan dengan kegiatan pendukung :
 - a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

B. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d) Pelayanan Kesehatan Balita
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - e) Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - f) Pelayanan Kesehatan Usia Lansia
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - g) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i) Pelayanan Kesehatan Penderita DM
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j) Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - k) Pelayanan kesehatan terduga tuberculosis
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

l) Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

C. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pekerjaan Umum

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari

a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

2. Program Kawasan Permukiman

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

D. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Perumahan dan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten

- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota

1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

- b) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kab/Kota

E. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Trantibum

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. Program Penanggulangan Bencana

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a) Kegiatan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

F. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Sosial

- 1. Program Rehabilitasi Sosial
 - a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Alat bantu
 - Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - c) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

2. Program Penanganan Bencana

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Makanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososial

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang otonom untuk menciptakan *clean governance* serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan program dan kegiatan di semua urusan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2022.

LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini di harapkan akan menjadi titik tolak untuk mengarahkan cara pandang bagi perbaikan pembangunan di Kabupaten Kebumen kedepan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen dituntut untuk bisa menjadi lebih baik khususnya dalam menjawab permasalahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan LPPD ini di pandang bukan hanya sekedar pemenuhan formalitas belaka tetapi juga harus bisa menjadi semacam upaya moral agar penyelenggaraan pemerintah tetap memberikan perhatian lebih dalam mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan, kesehatan dan kebersihan hati bagi kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian demi percepatan pembangunan di Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Pada Tahun 2022 Kabupaten Kebumen menerima penghargaan tingkat Nasional diantaranya sebagai berikut :

- A. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - 1. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori nilai B
 - 2. Penghargaan untuk Zona Integritas, DPMPTSP dengan Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) Tahun 2022
 - 3. Penghargaan untuk Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik , DPMPTSP Kategori Pelayanan Prima Tahun 2022
- B. Kementerian Keuangan
 - 1. Pemerintah Daerah Terbaik Kinerja Penyaluran Program Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Tahun 2022 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- C. Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - 1. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Kebumen menuju informatif
- D. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1. Kabupaten Kreatif Indonesia Tahun 2022
- E. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1. Kabupaten Layak Anak kategori Madya
- F. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
 - 1. Sekolah Adiwiyata Nasional
- G. Badan Koordinasi Penanaman Modal (B KPM)
 - 1. Penghargaan untuk Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB)
- H. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - 1. predikat WTP selama 5 (lima) kali berturut turut
- I. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
 - 1. Anugerah KPAI Tahun 2022